

LAPORAN TEKNIS

Status dan Tren Sosial Ekonomi Masyarakat Kawasan Konservasi Perairan Teluk Mayalibit di Perairan Raja Ampat Tahun 2025

Oleh

**Fitryanti Pakiding, Dariani Matualage, Kezia E. Salosso, Dahlia G. R.
Menufandu, Marthinus J. Rumere, Jeniffer A. Maleke, Trigarcia M.
Randa, dan Arnoldus S. Ananta**



LAPORAN TEKNIS

Status dan Tren Sosial Ekonomi Masyarakat
Kawasan Konservasi Perairan Teluk Mayalibit
Di Perairan Raja Ampat Tahun 2025



Penulis

Fitryanti Pakiding, Dariani Matualage,
Kezia E. Salosso, Dahlia G. R. Menufandu,
Marthinus J. Rumere, Jeniffer A. Maleke,
Trigarcia M. Randa, dan Arnoldus S. Ananta

Program Sains untuk Konservasi,
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Papua

LAPORAN TEKNIS

Status dan Tren Sosial Ekonomi Masyarakat Kawasan Konservasi Perairan Teluk Mayalibit Di Perairan Raja Ampat Tahun 2025

Penulis

Fitryanti Pakiding, Dariani Matualage, Kezia E. Salosso, Dahlia G. R. Menufandu, Marthinus J. Rumere, Jeniffer A. Maleke, Trigarcia M. Randa, dan Arnoldus S. Ananta

Program Sains untuk Konservasi, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Papua

Saran Sitasi

Pakiding, F., D. Matualage, K.E. Salosso, D.G.R. Menufandu, M.J. Rumere, J.A. Maleke, T.M. Randa, dan A.S. Ananta. 2026. Status dan Tren Sosial Ekonomi di Kawasan Konservasi Perairan Teluk Mayalibit Tahun 2025 (*Laporan Teknis*). Program Sains untuk Konservasi LPPM Universitas Papua, Manokwari.

Foto Sampul: Kezia E. Salosso_Program Sains untuk Konservasi, LPPM UNIPA

Desain dan Tata Letak: Kezia E. Salosso_Program Sains untuk Konservasi, LPPM UNIPA

PENGANTAR

Laporan Teknis ini disusun sebagai bagian dari upaya mendukung pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Teluk Mayalibit di Kabupaten Raja Ampat melalui penyediaan data dan informasi sosial ekonomi masyarakat berbasis pemantauan lapangan. Laporan ini menyajikan kondisi terkini (status) dan tren sosial ekonomi masyarakat pesisir, mencakup aspek demografi, mata pencaharian, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, penggunaan sumber daya laut, persepsi terhadap perubahan iklim dan cuaca, serta tingkat pengetahuan masyarakat mengenai kawasan konservasi. Pemantauan ini merupakan bagian dari kegiatan jangka panjang yang telah dilaksanakan sejak tahun 2010 hingga 2025 .

Hasil pemantauan tahun 2025 menunjukkan bahwa masyarakat di KKP Teluk Mayalibit masih sangat bergantung pada sektor perikanan tangkap sebagai sumber penghidupan utama, meskipun mulai berkembang diversifikasi mata pencaharian melalui kegiatan berkebun, pekerjaan upahan, dan usaha lokal. Partisipasi pendidikan tergolong cukup baik, dan keterikatan masyarakat terhadap wilayah laut tetap tinggi sebagai modal sosial penting dalam mendukung pengelolaan kawasan konservasi berbasis masyarakat.

Di sisi lain, sejumlah tantangan masih dihadapi, terutama penurunan ketahanan pangan rumah tangga, fluktuasi kepemilikan aset, serta keterbatasan akses pasar akibat faktor jarak dan transportasi. Perubahan iklim dan cuaca juga dirasakan secara luas dan mempengaruhi aktivitas ekonomi, khususnya kegiatan melaut dan produksi pangan. Dari aspek tata kelola, pemahaman masyarakat terhadap kawasan konservasi dan aturan penangkapan ikan cukup baik, namun belum merata antar kampung, sehingga diperlukan penguatan sosialisasi dan pendekatan berbasis lokal.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah, pengelola kawasan, dan para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. Secara khusus, hasil pemantauan ini diharapkan dapat memperkuat integrasi antara tujuan konservasi sumber daya laut dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir di KKP Teluk Mayalibit.

Manokwari, April 2026

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan sosial ekonomi masyarakat di Kawasan Konservasi Perairan Teluk Mayalibit tahun 2025.

Ucapan terima kasih kami tujukan kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, dalam hal ini BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat atas dukungan kelembagaan yang sangat berarti dalam penyelenggaraan kegiatan ini.

Kami juga berterima kasih kepada Universitas Papua, khususnya kepada Rektor (Prof. Dr. Hugo Warami, S.Pd., M.Hum), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Prof. Dr. Ir. Freddy Pattiselano, M.Sc), dan Tim Lapangan (Agustinus Aiwor, Jackson Bundah, Jelly A. Palle, Maria M. Bame, Rivaldo S. Heipon, Spenyel Yenusi dan Thomas Sembai).

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Raja Ampat beserta pemerintah distrik terkait atas dukungan dan koordinasi yang membantu kelancaran kegiatan di tingkat daerah.

Penghargaan yang tulus kami sampaikan kepada pemerintah kampung dan seluruh masyarakat di kampung Araway, Beo, Go, Kabilol, Kalitoko, Lopintol, Mumes, Waifoi, Waremak, Warsambin, dan Yensner atas sambutan hangat, keterbukaan, serta partisipasi aktif selama proses pengumpulan data berlangsung.

Terakhir, kami menyampaikan terima kasih kepada Blue Abadi Fund melalui Program Siklus 5 (Lima) atas dukungan pendanaan bagi pelaksanaan Program Pemantauan Sosial Masyarakat di Jejaring Kawasan Konservasi Perairan Bentang Laut Kepala Burung Tahun 2025/2026. Dukungan ini memungkinkan terselenggaranya kegiatan pemantauan secara mendalam dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan kawasan konservasi berbasis masyarakat.

DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	2
UCAPAN TERIMA KASIH.....	3
BAGIAN I PENDAHULUAN	5
BAGIAN II STATUS DAN TREN	7
Status dan Tren: Karakteristik Demografi.....	8
Populasi Umur dan Jenis Kelamin	8
Kepala Keluarga	9
Partisipasi Sekolah	10
Agama.....	11
Suku	12
Status dan Tren: Indikator Sosial.....	14
Ketahanan Pangan Rumah Tangga.....	14
Ketahanan Pangan Anak	15
Hari Sakit atau Cedera	16
Pemberdayaan Politik: Hak Kepemilikan Laut.....	17
Budaya: Keterikatan Tempat.....	19
Status dan Tren: Karakteristik Ekonomi	20
Pekerjaan Utama	21
Aset Rumah Tangga.....	22
Status dan Tren: Penggunaan Sumberdaya Laut.....	24
Frekuensi Melaut	24
Frekuensi Menjual Ikan	25
Penghasilan Penangkapan Ikan	26
Akses ke Pasar.....	27
Teknik Penangkapan Ikan	29
Status: Iklim dan Cuaca	31
Iklim dan Cuaca	31
Status: Kesadaran akan Peraturan Pelestarian Laut	33
Pengenalan Istilah Kawasan Konservasi.....	33
Mendengar atau Mengetahui Peraturan Penangkapan Ikan.....	34
Pendapat tentang Pengertian Kawasan Konservasi	35
Pendapat tentang Penangkapan Ikan di KKP.....	36
Letak Kampung di KKP	36
BAGIAN III REKOMENDASI KEBIJAKAN	38
DAFTAR PUSTAKA	42

BAGIAN I

PENDAHULUAN



Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Teluk Mayalibit merupakan kawasan strategis di Kabupaten Raja Ampat dengan luas sekitar 49.786,82 hektare yang secara geografis membagi Pulau Waigeo menjadi dua bagian. Kawasan ini didominasi oleh ekosistem pesisir penting seperti hutan bakau dan padang lamun yang luas, yang berperan sebagai habitat dan daerah asuhan bagi berbagai biota laut. Meskipun tutupan karang keras relatif rendah, Teluk Mayalibit menjadi habitat penting bagi berbagai spesies bernilai ekonomi seperti makarel (*Scombridae*), samandar (*Siganidae*), udang, bubara (*Carangidae*), kakap (*Lutjanidae*), serta kepiting lumpur (*Scylla*). Komoditas utama yang dihasilkan dari kawasan ini adalah makarel atau lema (*Rastrelliger* sp.) dan udang kering (udang ebi) yang menjadi sumber penghidupan masyarakat setempat. Bahkan, sebagian besar ikan makarel yang dikonsumsi di Raja Ampat berasal dari kawasan ini, yang juga berfungsi sebagai lokasi pemijahan penting (<https://kkprajaampat.com/teluk-mayalibit/>).

Dari aspek sosial dan kelembagaan, Teluk Mayalibit memiliki nilai historis dan budaya yang kuat sebagai wilayah asal Suku Maya. Masyarakat adat yang mendiami kampung-kampung di sekitar teluk memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap sumber daya perikanan. Kawasan ini juga merupakan KKP pertama di Raja Ampat yang ditetapkan melalui deklarasi adat pada tahun 2006 dan kemudian diperkuat melalui kebijakan daerah serta nasional. Dalam pengelolaannya, pendekatan kolaboratif diterapkan dengan melibatkan pemerintah daerah, masyarakat adat, dan mitra konservasi. Selain itu, inisiatif Kawasan Perikanan Adat (KPA) dikembangkan sebagai mekanisme berbasis hak untuk mengatur pemanfaatan sumber daya sesuai wilayah adat (<https://kkprajaampat.com/teluk-mayalibit/>).

Meskipun pendekatan kolaboratif telah diterapkan, pengelolaan kawasan masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut meliputi praktik perikanan yang belum sepenuhnya berkelanjutan, tekanan dari aktivitas pariwisata, serta keterbatasan kapasitas pengawasan dan penegakan aturan. Oleh karena itu, diperlukan sistem pemantauan yang mampu menangkap dinamika sosial ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Sejak tahun 2010, Universitas Papua (UNIPA) telah melaksanakan pemantauan sosial ekonomi melalui survei dasar dan pemantauan berkala hingga tahun 2025. Pemantauan ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak kawasan konservasi terhadap kesejahteraan masyarakat serta mendokumentasikan perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu di KKP Teluk Mayalibit.

Pada tahun 2025, pemantauan dilakukan di 11 kampung dalam wilayah Teluk Mayalibit dengan cakupan data yang komprehensif. Data yang dikumpulkan meliputi aspek demografi, ketahanan pangan, kesehatan, ekonomi rumah tangga, kepemilikan aset, serta pemanfaatan sumber daya laut. Selain itu, pemantauan juga mencakup partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan serta persepsi terhadap perubahan iklim dan kondisi cuaca. Laporan teknis ini menyajikan analisis hasil pemantauan tahun 2025 dengan membandingkannya terhadap data sebelumnya sebagai dasar perumusan kebijakan yang adaptif. Dengan demikian, pengelolaan KKP Teluk Mayalibit diharapkan dapat semakin efektif dalam menjaga keberlanjutan sumber daya sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

BAGIAN II

STATUS DAN TREN

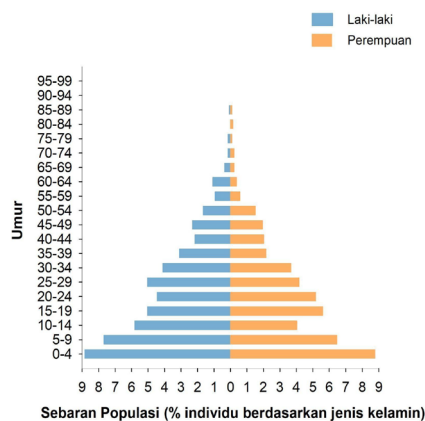


Status dan Tren: Karakteristik Demografi

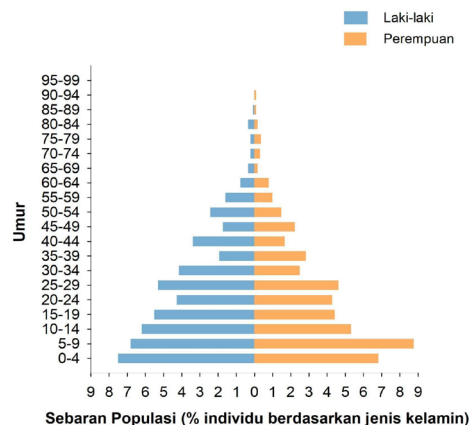
Populasi Umur dan Jenis Kelamin

Berdasarkan hasil pemantauan tahun 2025, struktur penduduk di wilayah KKP Teluk Mayalibit menunjukkan pola piramida penduduk yang masih didominasi kelompok usia muda, terutama pada rentang usia 5–19 tahun. Kelompok umur terbesar terlihat pada usia sekolah (5–9 tahun dan 10–14 tahun), baik pada laki-laki maupun perempuan, yang menandakan tingginya proporsi penduduk usia anak dan remaja. Sementara itu, kelompok usia produktif (15–64 tahun) juga cukup besar, dengan proporsi laki-laki (31,58%) sedikit lebih tinggi dibandingkan perempuan (28,17%), mencerminkan peran dominan laki-laki dalam aktivitas ekonomi, khususnya sektor perikanan dan pekerjaan lapangan lainnya. Pada kelompok usia lanjut (>65 tahun), proporsinya relatif kecil, yang mengindikasikan struktur penduduk yang masih muda (young population structure). Secara umum, distribusi ini menunjukkan bahwa rumah tangga di Teluk Mayalibit memiliki potensi tenaga kerja yang besar di masa mendatang, namun juga membutuhkan dukungan layanan pendidikan dan kesehatan yang memadai.

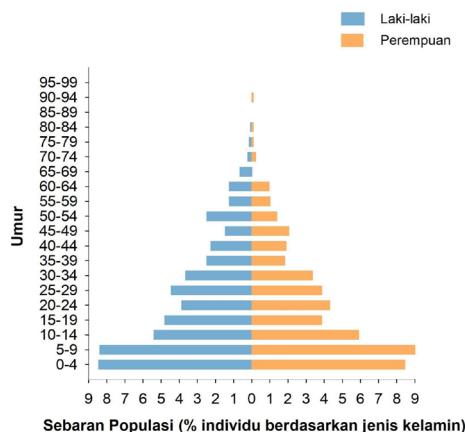
a) Tahun 2010



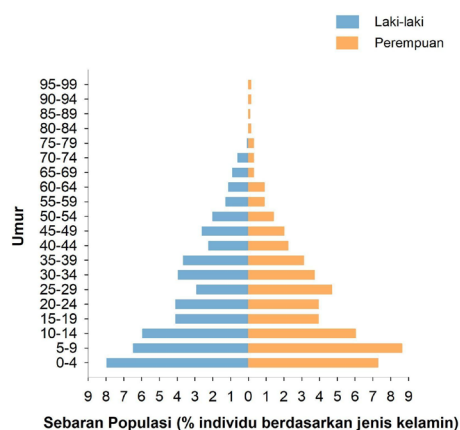
b) Tahun 2012



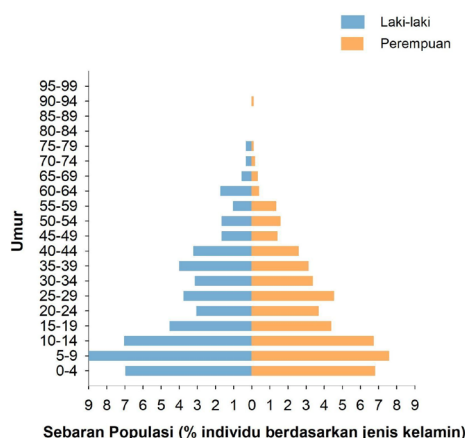
c) Tahun 2014



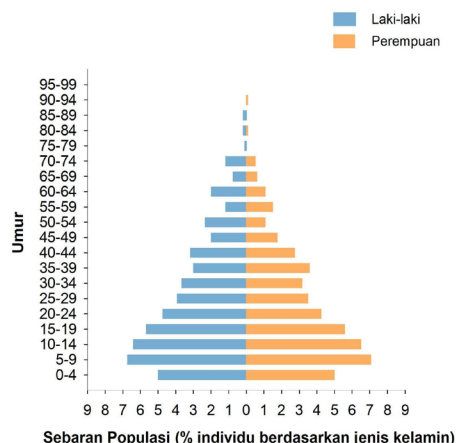
d) Tahun 2017



e) Tahun 2021



f) Tahun 2025



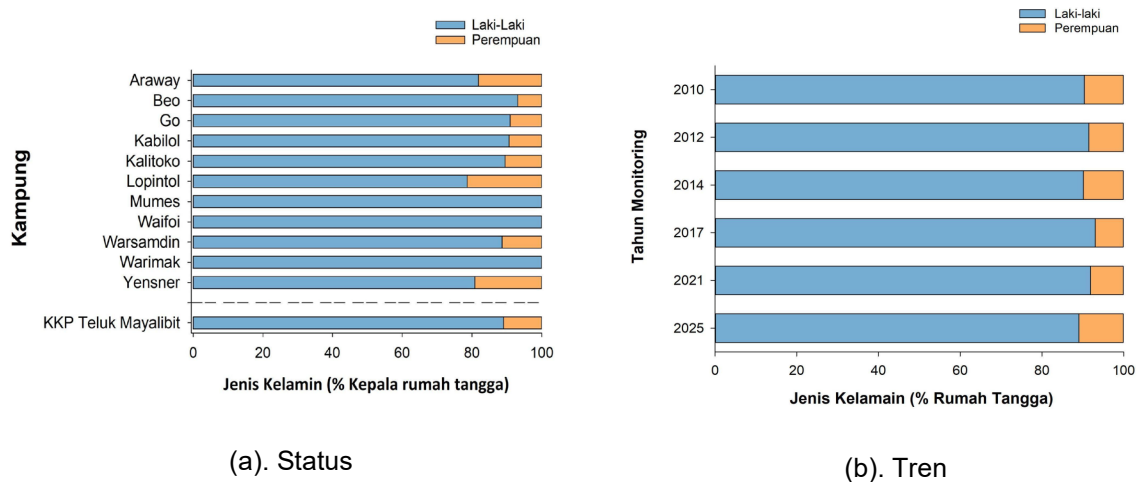
Gambar 1. Sebaran Populasi Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

Dalam periode pemantauan tahun 2010–2025, struktur umur penduduk menunjukkan pola yang relatif konsisten, yaitu didominasi oleh kelompok usia anak-anak hingga usia muda (0–19 tahun). Pada tahun 2010 hingga 2014, piramida penduduk memperlihatkan basis yang lebar pada kelompok usia 0–9 tahun, yang kemudian bergeser menjadi dominan pada kelompok usia 5–14 tahun pada periode 2017–2021. Pada tahun 2025, distribusi semakin terkonsentrasi pada rentang usia 5–19 tahun, yang mencerminkan proses pertumbuhan penduduk yang berlanjut serta pergeseran kohort umur. Selain itu, komposisi jenis kelamin pada seluruh periode menunjukkan pola yang relatif seimbang pada tiap kelompok umur, meskipun pada tingkat rumah tangga atau responden laki-laki cenderung lebih dominan. Secara keseluruhan, tren ini mengindikasikan bahwa wilayah Teluk Mayalibit masih berada pada fase struktur penduduk muda, dengan implikasi penting terhadap kebutuhan pembangunan sumber daya manusia, lapangan kerja, dan keberlanjutan mata pencaharian di masa depan.

Kepala Keluarga

Monitoring pada tahun 2025 mencakup 270 rumah tangga di wilayah KKP Teluk Mayalibit dan menunjukkan bahwa komposisi kepala rumah tangga masih sangat didominasi oleh laki-laki, dengan rata-rata mencapai sekitar 89,08%, sementara perempuan sekitar 10,92%. Hal ini mencerminkan bahwa struktur kepemimpinan rumah tangga di sebagian besar kampung masih berada pada laki-laki. Variasi antar kampung relatif kecil, meskipun beberapa kampung seperti Mumes, Wafoi, dan Warimak seluruhnya (100%) memiliki kepala rumah tangga laki-laki. Kampung lain juga menunjukkan dominasi laki-laki yang tinggi, seperti Beo (93,10%), Go (90,90%), Kabilol (90,62%), dan Kalitoko (89,47%). Sementara itu, Lopintol (21,43%) dan Yensner (19,23%) memiliki proporsi kepala rumah tangga perempuan yang relatif lebih tinggi dibandingkan kampung lainnya. Secara keseluruhan, meskipun laki-laki masih menjadi kepala

rumah tangga utama, keberadaan perempuan sebagai kepala rumah tangga tetap terlihat di beberapa kampung.



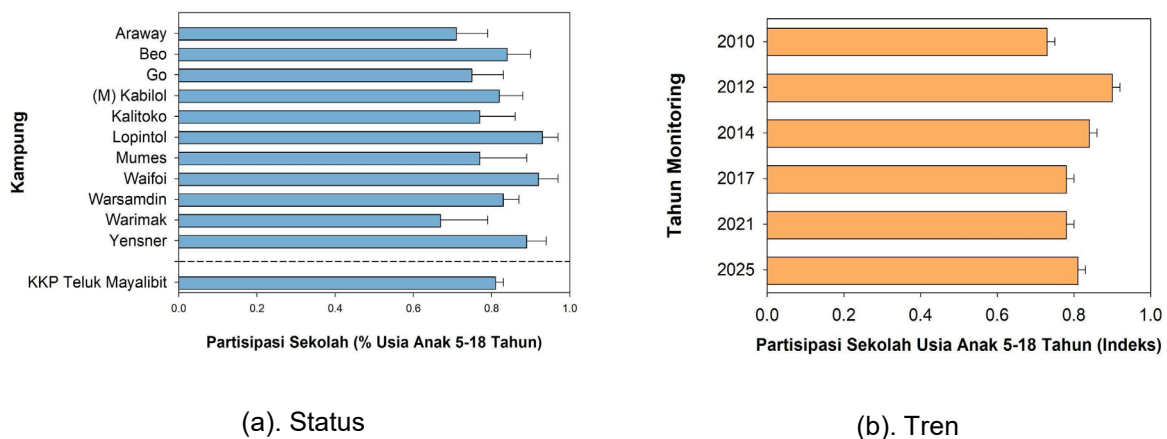
Gambar 2. Status dan Tren Kepala Rumah Tangga

komposisi kepala rumah tangga di KKP Teluk Mayalibit secara konsisten didominasi oleh laki-laki. Pada tahun 2010, proporsi kepala rumah tangga laki-laki tercatat sebesar 90,38%, sedangkan perempuan 9,62%. Proporsi kepala rumah tangga perempuan sempat menurun pada tahun 2012 (8,49%) dan 2017 (6,94%), namun meningkat kembali pada tahun 2014 (9,88%) dan 2021 (8,10%). Pada tahun 2025, proporsi kepala rumah tangga perempuan mencapai 10,92%, yang merupakan nilai tertinggi selama periode pemantauan. Pola ini menunjukkan adanya fluktuasi, namun dengan kecenderungan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Secara umum, tren ini mengindikasikan mulai meningkatnya peran perempuan sebagai kepala rumah tangga, meskipun secara keseluruhan laki-laki tetap menjadi kelompok dominan di wilayah Teluk Mayalibit.

Partisipasi Sekolah

Berdasarkan hasil pemantauan tahun 2025, tingkat partisipasi sekolah anak usia 5–18 tahun di wilayah KK Teluk Mayalibit tergolong cukup tinggi, dengan rata-rata kawasan mencapai sekitar 81%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar anak usia sekolah masih terlibat dalam pendidikan formal. Perbedaan antar kampung tetap terlihat, di mana Lopintol (93%) dan Waifoi (92%) mencatat tingkat partisipasi tertinggi, diikuti Yensner (89%), Beo (84%), dan Warsamdin (83%). Sementara itu, tingkat partisipasi relatif lebih rendah ditemukan di Araway (71%) dan Warimak (67%), yang mengindikasikan masih terdapat anak usia sekolah yang belum atau tidak lagi bersekolah secara aktif. Secara umum, akses pendidikan dasar sudah tersedia di seluruh kampung, sedangkan jenjang SMP terpusat di Beo, Go, dan Warsambin, serta SMA berada di Go, sehingga sebagian anak perlu berpindah kampung untuk melanjutkan pendidikan. Dukungan lain berupa program sekolah gratis di sekolah negeri serta

kesempatan melanjutkan kuliah ke Waisai dan Sorong turut menjadi faktor pendorong partisipasi pendidikan di kawasan ini.



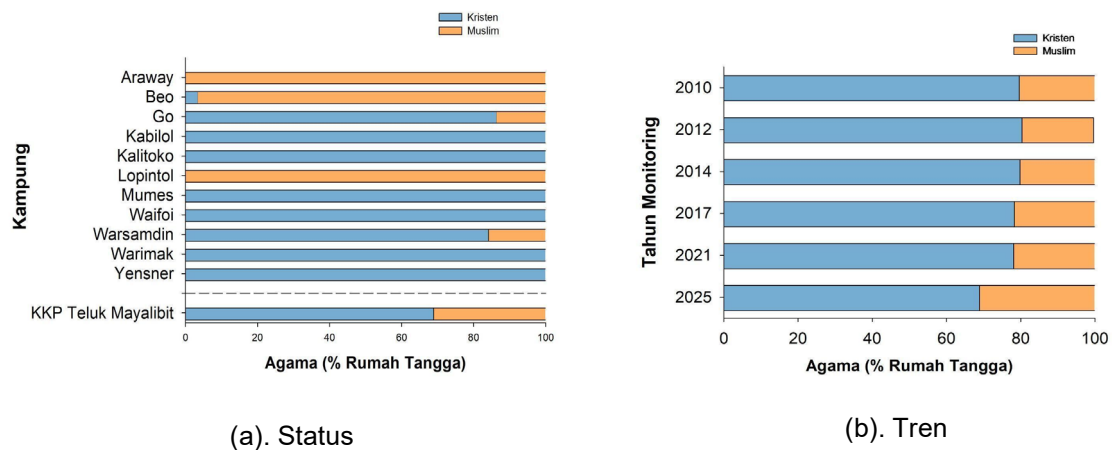
Gambar 3. Status dan Tren Partisipasi Sekolah Usia Anak

Dalam periode pemantauan tahun 2010–2025, tingkat partisipasi sekolah anak usia 5–18 tahun di KK Teluk Mayalibit menunjukkan pola fluktuatif namun tetap berada pada tingkat cukup tinggi. Pada tahun 2010, partisipasi sekolah tercatat sekitar 73%, kemudian meningkat menjadi 90% pada tahun 2012 sebagai capaian tertinggi selama periode pemantauan. Setelah itu, nilainya menurun menjadi 84% pada 2014 dan kembali turun ke 78% pada 2017 serta tetap berada pada kisaran yang sama di tahun 2021. Pada tahun 2025, indikator ini kembali meningkat menjadi sekitar 81%, menandakan adanya perbaikan dibanding periode sebelumnya. Perubahan antar tahun kemungkinan dipengaruhi oleh kemudahan maupun hambatan akses pendidikan lanjutan, karena sebagian pelajar harus keluar kampung menuju Go, Warsambin, Waisai, atau Sorong untuk melanjutkan sekolah. Selain itu, kendala biaya transportasi dan kondisi cuaca, terutama saat musim angin selatan dengan gelombang tinggi, juga dapat membatasi mobilitas pelajar menuju sekolah. Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan bahwa partisipasi pendidikan di Teluk Mayalibit tetap terjaga, namun peningkatan akses pendidikan menengah dan transportasi yang aman masih menjadi kebutuhan penting.

Agama

Berdasarkan hasil pemantauan tahun 2025, komposisi agama rumah tangga di wilayah KKP Teluk Mayalibit didominasi oleh agama Kristen dengan proporsi yang sangat tinggi di sebagian besar kampung. Kampung Kabilol, Kalitoko, Mumes, Waifoi, Warimak, dan Yensner tercatat seluruh rumah tangganya beragama Kristen (100%). Kampung Go dan Warsambin juga menunjukkan dominasi agama Kristen yang kuat, masing-masing sebesar 86,36% dan 84,09%, dengan sebagian kecil rumah tangga beragama Islam. Di sisi lain, kampung seperti Araway dan Lopintol didominasi oleh agama Islam (100%), sementara Beo memiliki mayoritas rumah tangga beragama Islam sebesar 96,55%. Keberadaan rumah tangga beragama Islam

di beberapa kampung umumnya berkaitan dengan dinamika sosial dan mobilitas penduduk, baik melalui perkawinan maupun perpindahan penduduk dari luar Papua yang telah menetap dalam jangka waktu lama. Kelompok ini antara lain berasal dari Buton, Bugis, Minahasa, dan Ambon, yang umumnya bekerja sebagai pedagang, pengepul, atau penadah hasil laut. Secara keseluruhan, struktur agama rumah tangga di wilayah ini relatif homogen pada tingkat kampung, namun menunjukkan variasi antar kampung dengan dominasi agama tertentu yang cukup kuat.



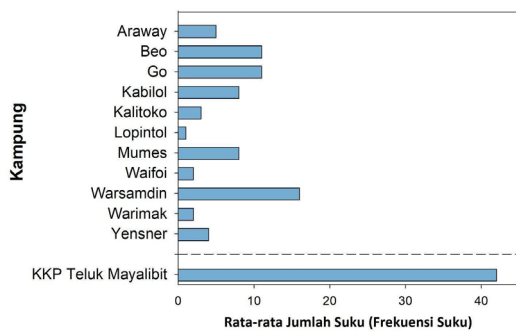
Gambar 4. Status dan Tren Agama

Analisis tren sejak tahun dasar 2010 hingga 2025 menunjukkan bahwa komposisi agama rumah tangga di wilayah KKP Teluk Mayalibit cenderung stabil dengan dominasi agama Kristen. Pada tahun 2010, proporsi rumah tangga beragama Kristen tercatat sebesar 79,62%, sementara Islam sekitar 20,38%. Proporsi tersebut relatif stabil hingga tahun 2014, dengan sedikit fluktuasi pada kisaran 19–21% untuk Islam. Namun, pada periode terbaru tahun 2025, proporsi rumah tangga beragama Islam meningkat menjadi sekitar 31,09%, diikuti dengan penurunan proporsi Kristen menjadi 68,91%. Meskipun demikian, secara umum agama Kristen tetap menjadi agama mayoritas di kawasan ini. Peningkatan proporsi Islam dalam beberapa tahun terakhir mengindikasikan adanya dinamika sosial, yang kemungkinan berkaitan dengan mobilitas penduduk dan aktivitas ekonomi, khususnya perdagangan dan pengumpulan hasil laut di beberapa kampung. Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan bahwa struktur agama relatif stabil, namun mulai mengalami perubahan komposisi secara bertahap dalam periode terbaru.

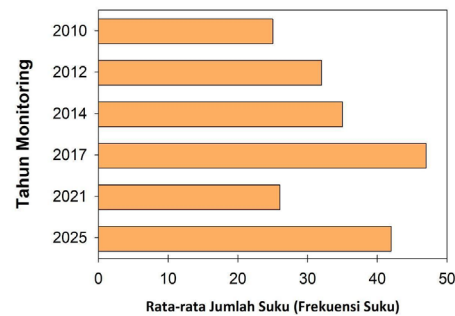
Suku

Berdasarkan hasil pemantauan tahun 2025, keragaman suku di wilayah KKP Teluk Mayalibit menunjukkan variasi antar kampung dengan jumlah suku yang tercatat berkisar antara 1 hingga 16 suku. Kampung Warsambin mencatat jumlah suku tertinggi dengan sekitar 16 suku, sementara Kampung Beo dan Go masing-masing sekitar 11 suku, diikuti Kampung Kabilol dan Mumes 8 suku, Kampung Araway 5 suku, Kampung Yensner 4 suku, Kampung Kalitoko 3 Suku, Kampung Waifo 2 suku, Kampung Waremak 2 Suku dan Kampung Lopintol memiliki

jumlah suku yang lebih sedikit yaitu sekitar 1 suku. Suku yang paling dominan ditemukan di wilayah ini adalah suku Maya, diikuti oleh suku Biak, suku Ambel dan suku Beser. Selain itu, terdapat pula beberapa suku lain yang berasal dari luar wilayah setempat seperti Seram, Buton, Halmahera dan Biak Raja Ampat (Suku Beteuw). Serta sebagian kecil dari daerah lain di Indonesia. Tingginya keragaman suku di Kampung Warsambin berkaitan dengan jumlah penduduk yang relatif lebih besar serta mobilitas masyarakat yang lebih tinggi dibandingkan kampung lainnya. Kehadiran masyarakat dari berbagai latar belakang suku ini umumnya berkaitan dengan aktivitas ekonomi dan pelayanan publik seperti guru, tenaga kesehatan, pegawai distrik, pedagang, maupun nelayan.



(a). Status



(b). Tren

Gambar 5. Status dan Tren Suku

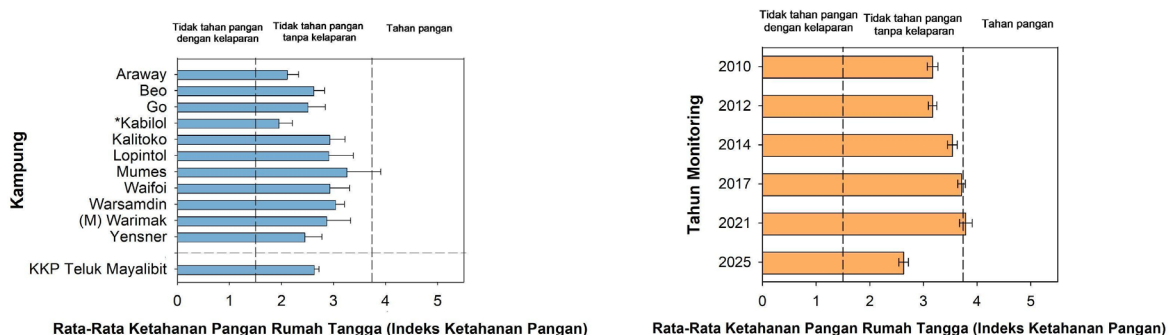
Analisis tren sejak tahun dasar 2010 hingga 2025 menunjukkan bahwa keragaman suku di wilayah KKP Teluk Mayalibit mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Pada awal pemantauan tahun 2010, rata-rata proporsi suku yang tercatat sekitar 25 suku. Komposisi tersebut meningkat menjadi sekitar 32 suku pada tahun 2012, kemudian menjadi 35 suku pada tahun 2014, dan mencapai komposisi tertinggi 47 suku pada tahun 2017. Namun, proporsi tersebut menurun menjadi 26 suku pada tahun 2021, kemudian kembali meningkat menjadi 42 suku pada tahun 2025. Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan bahwa keragaman suku di wilayah KKP Teluk Mayalibit cenderung meningkat dari waktu ke waktu, yang kemungkinan dipengaruhi oleh mobilitas penduduk serta kedatangan masyarakat dari berbagai daerah yang bekerja di sektor pemerintahan, perdagangan, maupun perikanan di wilayah tersebut.

Status dan Tren: Indikator Sosial

Ketahanan Pangan Rumah Tangga

Ketahanan pangan rumah tangga didefinisikan sebagai kemampuan rumah tangga untuk mengakses makanan yang aman, bergizi, dan sesuai dengan budaya lokal (Bickel et al., 2000). Sebaliknya, ketidaktahanan pangan menggambarkan kondisi ketika rumah tangga menghadapi kesulitan dalam memperoleh pangan yang memadai, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, yang pada gilirannya dapat meningkatkan risiko penyakit menular serta berdampak pada perkembangan fisik dan mental anak-anak. Dalam survei ini digunakan tiga skala ketahanan pangan rumah tangga sebagaimana dirumuskan oleh Departemen Pertanian Amerika Serikat (Bickel et al., 2000), yaitu: (1) tahan pangan, (2) tidak tahan pangan tanpa kelaparan, dan (3) tidak tahan pangan dengan kelaparan.

Hasil pemantauan tahun 2025 menunjukkan bahwa, tingkat ketahanan pangan rumah tangga di wilayah KK Teluk Mayalibit secara umum berada pada kategori tidak tahan pangan tanpa kelaparan, dengan nilai rata-rata kawasan sekitar 2,63. Nilai ini menunjukkan bahwa sebagian rumah tangga masih menghadapi keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan pangan secara konsisten, meskipun kondisi kelaparan berat relatif jarang terjadi. Variasi antar kampung terlihat cukup jelas, di mana Mumes (3,26) dan Warsamdin (3,04) menunjukkan kondisi relatif lebih baik, diikuti Waifo dan Kalikoto masing-masing sekitar 2,93, sedangkan Kabilol (1,95) dan Araway (2,11) berada pada tingkat yang lebih rendah. Secara umum, rumah tangga mengandalkan kombinasi sumber pangan dari berkebun, menangkap ikan, dan membeli bahan pangan dari pasar. Namun demikian, beras sebagai bahan pangan penting umumnya harus dibeli dari Waisai atau Sorong, sehingga ketersediaannya sangat dipengaruhi akses transportasi dan kemampuan membeli. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan masyarakat masih dipengaruhi oleh akses pasar, hasil kebun, serta kemampuan rumah tangga memanfaatkan sumber daya lokal.



(a). Status

(b). Tren

Gambar 6. Status dan Tren Ketahanan Pangan Rumah Tangga

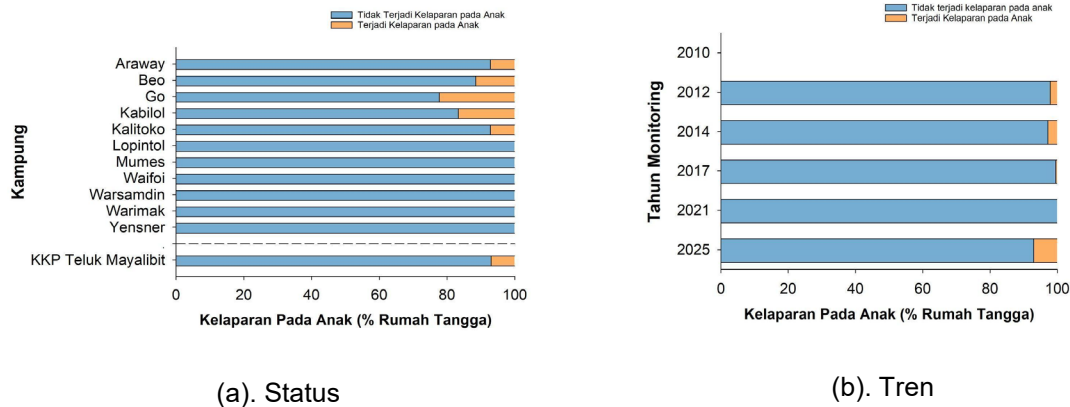
Dalam periode pemantauan tahun 2010–2025, tingkat ketahanan pangan rumah tangga di KK Teluk Mayalibit menunjukkan pola membaik hingga 2021, kemudian menurun pada 2025. Nilai

indeks tercatat sekitar 3,17 pada tahun 2010 dan tetap sama pada 2012, kemudian meningkat menjadi 3,54 pada 2014 serta 3,71 pada 2017. Peningkatan berlanjut pada tahun 2021 hingga mencapai 3,79, yang menunjukkan kondisi rumah tangga semakin mendekati kategori tahan pangan. Namun, pada tahun 2025 nilai indeks turun cukup tajam menjadi 2,63, menandakan meningkatnya tekanan terhadap pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga. Berdasarkan catatan lapangan, kondisi ini kemungkinan dipengaruhi oleh keterbatasan BBM yang menghambat akses ke pasar, lokasi kebun yang relatif jauh dari kampung, serta hasil kebun yang menurun akibat curah hujan yang sering terjadi. Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat memiliki sumber pangan lokal dari kebun dan laut, ketahanan pangan rumah tangga tetap rentan terhadap gangguan akses, cuaca, dan kondisi ekonomi.

Ketahanan Pangan Anak

Ketahanan pangan pada anak-anak merupakan indikator penting untuk mengukur kesejahteraan rumah tangga, karena anak-anak yang pertama akan menjadi rentan kekurangan gizi dalam rumah tangga (Martorell, 1995). Ketahanan pangan sangat penting bagi perkembangan fisik dan mental anak-anak. Anak-anak yang mengalami kerawanan pangan dapat beresiko lebih besar mengalami defisiensi nutrisi yang terkait dengan masalah perkembangan fisik dan mental (Casey et al, 2005). Status ketahanan pangan anak-anak dalam penelitian ini terbagi menjadi dua (2) menggunakan klasifikasi dari Departemen Pertanian Amerika Serikat, yaitu tidak ada bukti kelaparan pada anak dan terdapat bukti kelaparan pada anak.

Berdasarkan hasil pemantauan tahun 2025, kondisi ketahanan pangan pada anak di wilayah KK Teluk Mayalibit secara umum tergolong baik, yang ditunjukkan oleh sekitar 93,01% rumah tangga menyatakan tidak terjadi kelaparan pada anak, sedangkan sekitar 6,99% melaporkan masih terjadi kelaparan pada anak. Sebagian besar kampung menunjukkan kondisi sangat baik, di mana Lopintol, Mumes, Waifoi, Warsamdin, Warimak, dan Yensner seluruhnya mencatat 100% rumah tangga tanpa kejadian kelaparan pada anak. Namun demikian, beberapa kampung masih menunjukkan kerentanan, terutama Go dengan sekitar 22,22% rumah tangga melaporkan kelaparan pada anak, diikuti Kabilol (16,67%), Beo (11,54%), serta Araway dan Kalikoto masing-masing sekitar 7,14%. Perbedaan kondisi antar kampung ini menunjukkan bahwa akses pangan dan kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan anak belum merata. Berdasarkan catatan lapangan, kondisi yang lebih baik umumnya didukung oleh rumah tangga yang memiliki lebih dari satu sumber mata pencaharian serta jumlah anggota keluarga yang relatif tidak banyak. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa meskipun mayoritas rumah tangga telah mampu menjaga kecukupan pangan anak, masih terdapat kelompok rentan yang memerlukan perhatian lebih lanjut.



Gambar 7. Status dan Tren Ketahanan Pangan Anak

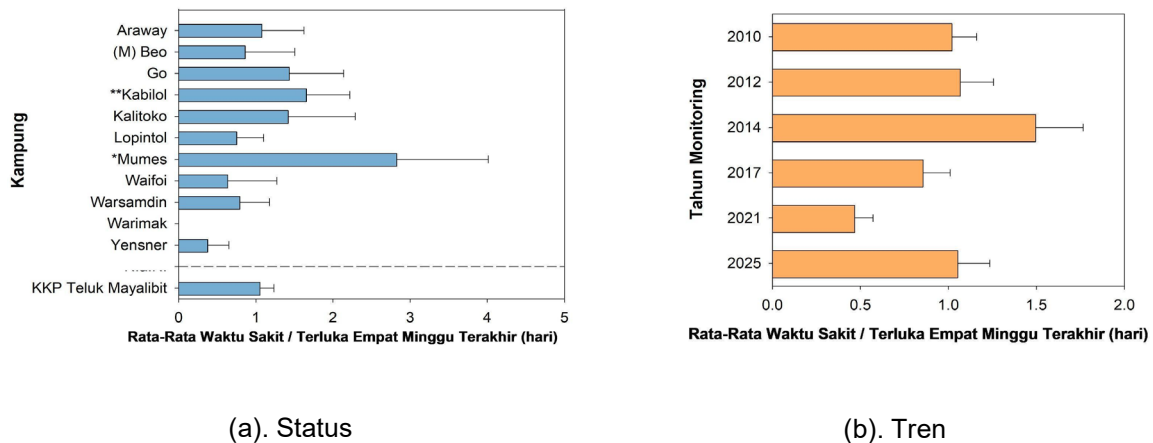
Pemantauan jangka panjang memperlihatkan bahwa ketahanan pangan anak di KK Teluk Mayalibit menunjukkan kondisi yang cenderung stabil baik, meskipun terdapat fluktuasi pada beberapa tahun. Persentase rumah tangga yang tidak mengalami kelaparan pada anak tercatat sekitar 97,93% pada tahun 2012 dan 97,24% pada 2014, kemudian meningkat menjadi 99,57% pada 2017. Kondisi terbaik terjadi pada tahun 2021, ketika seluruh rumah tangga responden (100%) melaporkan tidak terjadi kelaparan pada anak. Namun, pada tahun 2025 persentase tersebut menurun menjadi 93,01%, bersamaan dengan meningkatnya rumah tangga yang melaporkan adanya kelaparan pada anak menjadi 6,99%. Penurunan ini mengindikasikan adanya tekanan terhadap kemampuan sebagian rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan anak, yang dapat berkaitan dengan kondisi ekonomi, akses pangan, maupun meningkatnya beban tanggungan keluarga. Secara umum, tren jangka panjang tetap menunjukkan bahwa perlindungan pangan anak di kawasan ini relatif baik, tetapi memerlukan upaya berkelanjutan agar kelompok rentan tidak semakin terdampak.

Hari Sakit atau Cedera

Untuk mengevaluasi penyakit atau sakit yang dialami oleh setiap anggota rumah tangga yang tersampel, maka setiap rumah tangga yang disurvei ditanyakan “*apakah terdapat anggota rumah tangga yang menderita sakit atau cedera selama 4 minggu terakhir?*” Jumlah hari sakit atau cedera untuk semua individu dalam rumah tangga kemudian dijumlahkan. Batas maksimum hari sakit dalam penelitian ini adalah 28 hari atau empat (4) minggu.

Berdasarkan hasil pemantauan tahun 2025, rata-rata jumlah hari rumah tangga mengalami sakit atau cedera dalam empat minggu terakhir di wilayah KK Teluk Mayalibit tergolong relatif rendah, yaitu sekitar 1,05 hari per rumah tangga. Variasi antar kampung tetap terlihat, dengan Mumes mencatat rata-rata tertinggi sekitar 2,83 hari, diikuti Kabilol (1,66 hari), Go (1,43 hari), dan Kalikoto (1,42 hari). Sementara itu, kampung dengan rata-rata hari sakit terendah adalah Warimak (0 hari), Yensner (0,38 hari), Waifo (0,64 hari), dan Lopintol (0,75 hari). Masyarakat umumnya memanfaatkan Puskesmas, layanan puskesmas keliling, mengambil obat di kampung, atau melakukan pengobatan mandiri untuk keluhan ringan, sedangkan kasus yang

lebih berat memerlukan rujukan ke pusat layanan kesehatan yang lebih lengkap. Dukungan layanan kesehatan tersedia melalui Puskesmas Warsambin dan Waifoi, ketersediaan obat yang cukup memadai, serta keberadaan mantri atau tenaga kesehatan di beberapa kampung. Jenis gangguan kesehatan yang umum dilaporkan meliputi malaria, batuk/pilek, demam, diare, asam urat, kolesterol, hipertensi, rematik, asma, sakit paru-paru, serta beberapa kasus cedera seperti kecelakaan motor dan cedera ringan lainnya.



Gambar 8. Status dan Tren Rata-Rata Sakit atau Cedera

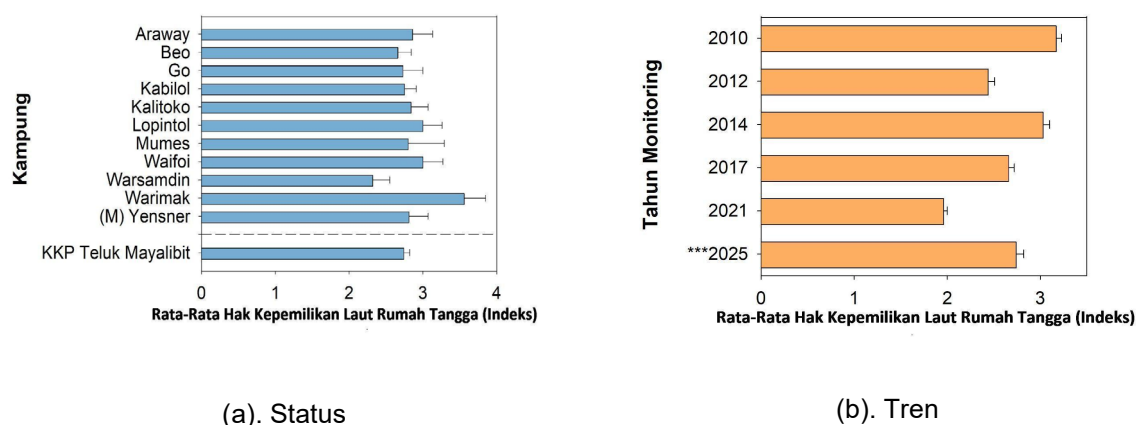
Dalam periode pemantauan tahun 2010–2025, rata-rata hari sakit atau cedera rumah tangga di KK Teluk Mayalibit menunjukkan pola fluktuatif namun cenderung rendah. Nilai rata-rata tercatat sekitar 1,02 hari pada tahun 2010 dan 1,07 hari pada 2012, kemudian meningkat menjadi 1,50 hari pada 2014 sebagai nilai tertinggi selama periode pemantauan. Setelah itu, kondisi membaik pada 2017 menjadi 0,86 hari, dan mencapai titik terendah pada tahun 2021 sebesar 0,47 hari. Pada tahun 2025, rata-rata hari sakit kembali meningkat menjadi 1,05 hari, meskipun masih berada pada tingkat moderat dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Perubahan ini diduga dipengaruhi oleh akses layanan kesehatan antar kampung, kendala transportasi dan BBM untuk rujukan, kondisi cuaca pada musim Angin Selatan yang cukup berbahaya untuk bepergian ke pusat kesehatan, serta meningkatnya penyakit tidak menular dan penyakit musiman di tingkat rumah tangga. Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan bahwa kondisi kesehatan masyarakat cukup terjaga, namun penguatan layanan kesehatan dasar, ketersediaan tenaga medis, dan kemudahan rujukan tetap menjadi kebutuhan penting di kawasan ini.

Pemberdayaan Politik: Hak Kepemilikan Laut

Hak Kepemilikan Laut (*Marine Tenure Rights*) adalah kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan terkait wilayah perairan laut yang mempengaruhi kehidupan mereka (United Nations Development Program et al. 1990). Kepemilikan laut merupakan dasar budaya dan hukum dari pengendalian sumberdaya laut

lokal yang telah dikaitkan dengan manfaat sosial dan ekologi (Cinner, 2005). Survei ini mendokumentasikan kepemilikan laut rumah tangga sebagai jumlah hak milik yang terpisah (misalnya, hak untuk mengakses, memanen, mengelola sumber daya laut, dan membuat keputusan) yang dilaksanakan oleh rata-rata rumah tangga di KKP dalam 12 bulan sebelum survei. Indeks kepemilikan laut dihitung berdasarkan serangkaian pertanyaan dalam survei rumah tangga yang mendokumentasikan partisipasi rumah tangga dalam tata kelola sumber daya laut, dengan kisaran skor mulai dari 0 hingga 5.

Berdasarkan hasil pemantauan tahun 2025, rata-rata hak kepemilikan rumah tangga terhadap perairan laut lokal di wilayah KK Teluk Mayalibit berada pada nilai 2,74 dari skala indeks (p -value = 0,000). Nilai ini menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki pengakuan dan akses yang cukup kuat terhadap wilayah laut adat mereka, serta mengindikasikan adanya perbedaan yang signifikan dalam tingkat kepemilikan hak antar kampung. Variasi antar kampung terlihat cukup jelas, dengan Warimak mencatat nilai tertinggi sekitar 3,56, diikuti Lopintol dan Waifoi masing-masing 3,00, sementara nilai terendah tercatat di Warsamdin sekitar 2,32. Kampung lainnya seperti Araway, Beo, Go, Kabilol, Kalitoko, Mumes, dan Yensner berada pada kisaran 2,66–2,86, yang menunjukkan kondisi relatif merata. Berdasarkan catatan lapangan, sistem kepemilikan laut umumnya masih didasarkan pada hak ulayat/adat, garis marga, serta keterikatan dengan kampung asal. Batas wilayah kepemilikan biasanya dikenali melalui penanda alam seperti kali, tanjung, dan pulau, serta dalam beberapa kasus kawasan laut disewakan kepada nelayan luar dengan sistem bagi hasil atau kompensasi. Secara umum, temuan ini menunjukkan bahwa kelembagaan adat masih menjadi dasar penting dalam penguasaan ruang laut masyarakat setempat.



Gambar 9. Status dan Tren Hak Kepemilikan Laut Rumah Tangga

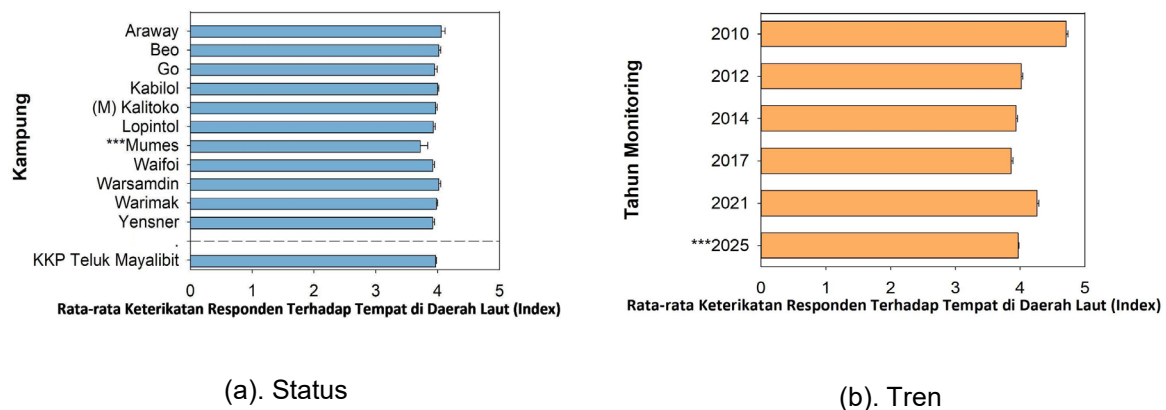
Dalam periode pemantauan tahun 2010–2025, indeks hak kepemilikan laut rumah tangga menunjukkan pola fluktuatif. Nilai rata-rata tercatat cukup tinggi pada tahun 2010 sebesar 3,17, kemudian menurun menjadi 2,44 pada 2012, sebelum kembali meningkat menjadi 3,03 pada 2014. Setelah itu, indeks kembali menurun menjadi 2,66 pada 2017 dan mencapai titik terendah pada tahun 2021 sebesar 1,96, lalu meningkat kembali pada tahun 2025 menjadi 2,74. Perubahan ini diduga berkaitan dengan dinamika pengaturan wilayah adat, perubahan

hubungan antar marga atau kampung, serta belum adanya penetapan batas wilayah laut yang jelas dan konsisten. Catatan lapangan juga menunjukkan bahwa sebagian batas laut masih sering berubah karena belum terdapat patok permanen maupun penguatan aturan formal dari pemerintah dan lembaga adat. Secara keseluruhan, tren ini menegaskan pentingnya harmonisasi antara sistem hak adat dan tata kelola formal agar kepastian hak kelola masyarakat terhadap wilayah laut tetap terjaga.

Budaya: Keterikatan Tempat

Keterikatan terhadap tempat yang dimaksud adalah hubungan emosional antara individu dan lingkungan laut masing-masing (Williams dan Vaske, 2003). Untuk mengukur seberapa kuat hubungan emosi antara individu yang berada di sekitar lingkungan laut dan lingkungannya, dilakukan studi dengan menggunakan indeks keterikatan emosi antara individu dan wilayah perairannya (*Place Attachment Index*) yang nilainya berkisar antara 0 sampai 5. Nilai 5 menunjukkan adanya hubungan emosi yang sangat kuat antara individu dan lingkungan laut di sekitarnya.

Berdasarkan hasil pemantauan tahun 2025, tingkat keterikatan emosional rumah tangga terhadap perairan laut lokal di wilayah KK Teluk Mayalibit tergolong tinggi, dengan nilai rata-rata kawasan sebesar 3,97 pada skala 1–5 ($p\text{-value} = 0,00$). Nilai tersebut menunjukkan adanya hubungan yang signifikan dengan keterkaitan tempat, yang mengindikasikan bahwa kedekatan masyarakat dengan ruang hidupnya berkontribusi nyata terhadap tingkat keterikatan terhadap wilayah perairan. Nilai antar kampung relatif merata, dengan skor tertinggi tercatat di Kampung Araway (4,06), diikuti oleh Beo dan Warsamdin (masing-masing 4,02), sedangkan nilai terendah terdapat di Kampung Mumes (3,72). Kampung lainnya, yaitu Go, Kabilol, Kalikoto, Lopintol, Waifoi, Warimak, dan Yensner, berada pada kisaran 3,92–4,00 yang menunjukkan ikatan emosional yang tetap kuat terhadap wilayah perairan setempat. Berdasarkan catatan lapangan, tingginya keterikatan ini dipengaruhi oleh kenyataan bahwa sebagian besar masyarakat lahir, tumbuh, dan hidup di kampung mereka, sehingga mengenal laut sebagai bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Masyarakat juga menilai bahwa hidup di kampung lebih menjamin ketersediaan pangan dan biaya hidup lebih rendah dibandingkan tinggal di kota. Secara umum, kondisi ini menunjukkan bahwa laut tidak hanya dipandang sebagai sumber penghidupan, tetapi juga sebagai bagian dari identitas sosial dan ruang hidup masyarakat lokal.



Gambar 10. Status dan Tren Keterikatan Tempat Rumah Tangga

Dalam periode pemantauan tahun 2010–2025, tingkat keterikatan emosional rumah tangga terhadap perairan laut lokal menunjukkan nilai yang konsisten tinggi meskipun berfluktuasi. Nilai rata-rata tercatat sangat tinggi pada tahun 2010 sebesar 4,71, kemudian menurun menjadi 4,02 pada 2012 dan 3,94 pada 2014. Penurunan berlanjut pada tahun 2017 menjadi 3,86, sebelum kembali meningkat pada 2021 menjadi 4,26. Pada tahun 2025, nilai kembali sedikit menurun menjadi 3,97, namun masih menunjukkan kategori keterikatan yang kuat. Fluktuasi ini diduga dipengaruhi oleh perubahan sosial, meningkatnya akses keluar kampung, serta pergeseran orientasi generasi muda, meskipun hubungan masyarakat dengan laut tetap dominan. Secara keseluruhan, tren ini menegaskan bahwa keterikatan masyarakat terhadap wilayah laut lokal masih terjaga kuat dan menjadi modal sosial penting dalam mendukung pengelolaan kawasan konservasi berbasis masyarakat.

Status dan Tren: Karakteristik Ekonomi

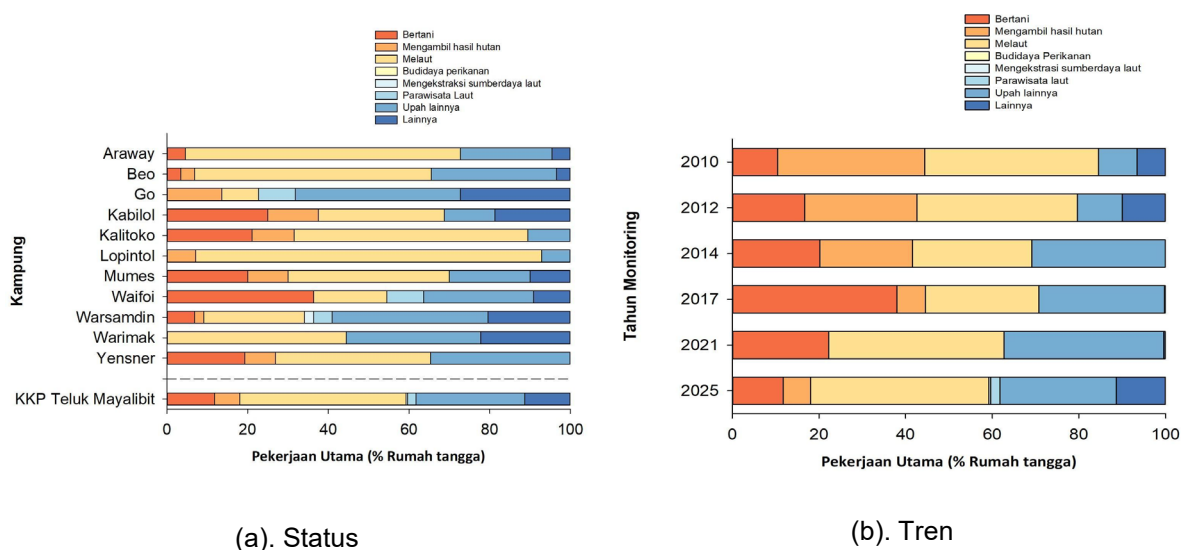
Karakteristik ekonomi yang digunakan dalam kajian ini mencakup dua aspek utama, yaitu pekerjaan utama dan aset rumah tangga. Pekerjaan utama mengacu pada cara utama yang dilakukan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pekerjaan utama ini digolongkan dalam lima kategori, yakni: bertani, yang meliputi budidaya tanaman atau beternak; mengambil hasil hutan, yang mencakup hasil hutan kayu dan non-kayu (sayur, buah-buahan, obat-obatan, kulit kayu, tali hutan, rotan, protein dari hewan); melaut, yang mencakup kegiatan menangkap ikan, crustaceans, dan sumber daya lainnya, baik untuk dijual maupun untuk konsumsi sendiri; pekerjaan yang menghasilkan upah lainnya, seperti guru, tenaga kesehatan, kehutanan, pekerja tambang, dan lainnya; serta kategori lainnya, yang mencakup pekerjaan yang tidak termasuk dalam kategori sebelumnya, seperti menukar jasa atau barang.

Selain itu, aset rumah tangga dalam kajian ini didefinisikan sebagai materi yang secara fisik dimiliki oleh rumah tangga dan masih dalam kondisi berfungsi dengan baik. Aset-aset yang

dimiliki rumah tangga di wilayah yang disurvei antara lain adalah radio, stereo, CD player, DVD player, TV, parabola, telepon (baik ponsel maupun telepon kabel), generator, perahu motor tanpa mesin, perahu motor mesin luar, perahu motor mesin dalam, sepeda, sepeda motor, serta mobil atau truk.

Pekerjaan Utama

Berdasarkan hasil pemantauan tahun 2025, struktur pekerjaan utama rumah tangga di KK Teluk Mayalibit didominasi oleh kegiatan melaut, dengan rata-rata kawasan mencapai 57,98% rumah tangga. Kampung dengan proporsi nelayan tertinggi tercatat di Lopintol (85,71%), diikuti Araway (68,18%), Beo (58,62%), dan Kalikoto (57,89%), sedangkan proporsi terendah terdapat di Go (9,09%). Selain melaut, pekerjaan utama lain yang cukup menonjol adalah upah lainnya seperti pegawai, buruh bangunan, guru, jasa transportasi, dan pekerjaan berpenghasilan tetap, dengan rata-rata kawasan 26,89%, terutama di Go (40,91%), Warsambin (38,64%), dan Yensner (34,62%). Kegiatan bertani juga masih penting di beberapa kampung, terutama Waifoi (36,36%), Kabilol (25,00%), dan Mumes (20,00%), sementara sebagian rumah tangga memperoleh tambahan pendapatan dari homestay, kios, maupun proyek pembangunan pemerintah yang berlangsung di beberapa kampung. Hasil tangkapan laut seperti ikan dan udang ebi juga menjadi sumber penghasilan, meskipun masyarakat menyampaikan bahwa posisi tawar nelayan masih lemah karena banyak penadah membeli dengan harga relatif rendah. Secara umum, kondisi ini menunjukkan bahwa ekonomi rumah tangga di Teluk Mayalibit bertumpu pada sektor perikanan tangkap, namun tetap ditopang diversifikasi pendapatan dari pertanian, pekerjaan upahan, usaha kecil, dan peluang ekonomi lokal lainnya.



Gambar 11. Status dan Tren Pekerjaan Utama Rumah Tangga

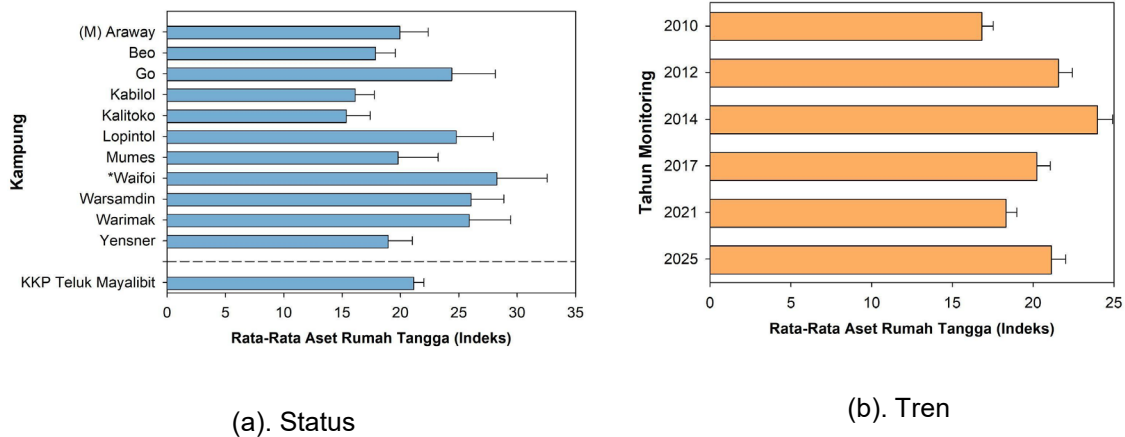
Kegiatan pertanian rumah tangga di Teluk Mayalibit umumnya dikelola melalui sistem kebun campuran (*mixed garden*), yaitu satu hamparan kebun yang ditanami berbagai komoditas pangan, buah, rempah, dan sayuran secara bersamaan. Komoditas yang paling banyak dijumpai antara lain ubi-ubian (ubi kayu, keladi/talas, ubi jalar), pisang, kelapa dan pinang, yang menjadi sumber pangan sekaligus pendapatan rumah tangga. Selain itu, masyarakat juga menanam sayuran seperti kangkung, bayam, gedi, cabai rawit, dan kacang panjang, serta tanaman buah seperti langsung, rambutan, dan durian untuk kebutuhan konsumsi maupun penjualan terbatas. Hasil kebun pada umumnya diprioritaskan untuk konsumsi rumah tangga, sementara kelebihan produksi dijual di tingkat kampung atau dipasarkan ke Waisai apabila akses transportasi memungkinkan. Luasan kebun bervariasi dari kebun kecil berukuran sekitar 20 x 20 meter hingga kebun yang lebih luas, dengan rata-rata kepemilikan sekitar 0,6 hektar per rumah tangga, sedangkan ukuran yang paling umum dijumpai adalah 50 x 50 meter dan 100 x 100 meter. Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan bahwa sektor pertanian masih berperan penting sebagai penyangga ketahanan pangan rumah tangga sekaligus sumber pendapatan pelengkap bagi masyarakat pesisir.

Dalam periode pemantauan tahun 2010–2025, komposisi pekerjaan utama rumah tangga menunjukkan adanya pergeseran antar sektor, meskipun kegiatan melaut tetap menjadi mata pencaharian dominan. Proporsi rumah tangga yang bekerja di sektor melaut relatif stabil, berada pada kisaran 37,95% (2017) hingga 41,18% (2025), setelah sempat menurun pada tahun 2021 (40,49%) dan sedikit lebih tinggi pada tahun 2010 (40,15%). Sebaliknya, sektor mengambil hasil hutan/berkebun mengalami penurunan yang cukup signifikan, dari 33,98% pada 2010 menjadi 11,76% pada 2025, yang mengindikasikan berkurangnya ketergantungan terhadap sektor tersebut sebagai pekerjaan utama. Di sisi lain, kategori upah lainnya meningkat secara nyata dari 8,88% pada 2010 menjadi 26,89% pada 2025, menunjukkan semakin pentingnya sumber pendapatan non-tradisional dalam struktur ekonomi rumah tangga. Aktivitas pariwisata laut mulai muncul pada tahun 2025, meskipun masih dalam proporsi kecil (2,10%), terutama dalam bentuk usaha homestay yang dikelola masyarakat, seperti di Waifo dan Warimak, serta jasa transportasi perahu untuk wisatawan. Sementara itu, sektor budidaya perikanan dan ekstraksi sumber daya laut tetap berada pada tingkat yang sangat rendah. Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan adanya transformasi menuju pola mata pencaharian yang lebih beragam, dengan perikanan tangkap tetap menjadi fondasi utama penghidupan masyarakat.

Aset Rumah Tangga

Berdasarkan hasil pemantauan tahun 2025, rata-rata kepemilikan aset rumah tangga di KK Teluk Mayalibit berada pada nilai 21,13 indeks, yang menunjukkan tingkat kepemilikan aset produktif dan aset rumah tangga pada kategori menengah. Kampung dengan nilai tertinggi tercatat di Waifo (28,27), diikuti Warsamdin (26,05), Warimak (25,89), Lopintol (24,79), dan Go (24,41). Sementara itu, nilai terendah terdapat di Kalikoto (15,37) dan Kabilol (16,12), yang mengindikasikan kepemilikan aset rumah tangga relatif lebih terbatas dibanding kampung lainnya. Berdasarkan catatan lapangan, aset yang paling umum dimiliki masyarakat meliputi

telepon genggam, perahu bermotor tempel, dan perahu berbahan fiberglass, yang mendukung aktivitas ekonomi dan mobilitas rumah tangga. Peningkatan aset di beberapa kampung juga dipengaruhi oleh bantuan dana desa serta pendapatan dari sektor berkebun dan pariwisata, terutama di Waifo. Secara umum, kondisi ini menunjukkan bahwa kepemilikan aset rumah tangga cukup beragam antar kampung dan sangat dipengaruhi oleh akses ekonomi, peluang usaha, serta kemampuan rumah tangga menghasilkan surplus pendapatan.



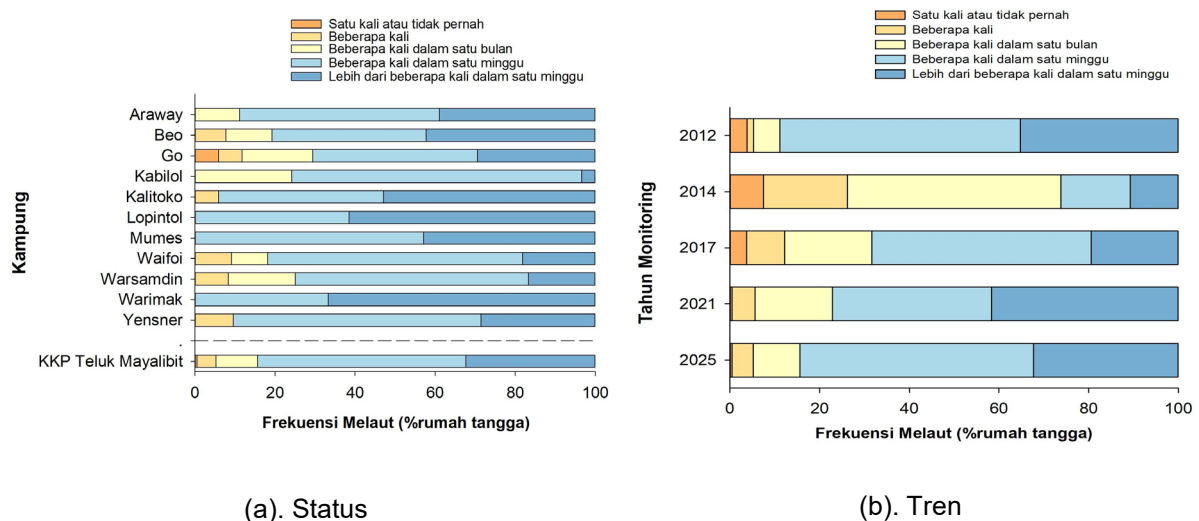
Gambar 12. Status dan Tren Rata-Rata Kepemilikan Aset Rumah Tangga

Dalam periode pemantauan tahun 2010–2025, rata-rata kepemilikan aset rumah tangga menunjukkan pola yang berfluktuasi. Nilai indeks meningkat dari 16,83 pada 2010 menjadi 21,57 pada 2012, dan mencapai puncak pada 23,98 pada 2014. Setelah itu, nilai aset mengalami penurunan menjadi 20,23 pada 2017 dan kembali turun ke 18,32 pada 2021, sebelum meningkat lagi menjadi 21,13 pada 2025. Fluktuasi ini mencerminkan perubahan kemampuan ekonomi rumah tangga dalam memperoleh maupun mempertahankan aset, baik yang bersifat produktif maupun konsumtif. Berdasarkan informasi lapangan, penurunan aset di beberapa kampung berkaitan dengan lemahnya pemasaran hasil kebun, kerusakan produksi akibat curah hujan tinggi, serta terganggunya aktivitas melaut karena kondisi cuaca. Selain itu, kepemilikan aset juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti keterbatasan frekuensi bantuan serta usia pakai aset yang relatif lama, misalnya perahu fiber yang dapat digunakan hingga sekitar 10 tahun. Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan bahwa kepemilikan aset rumah tangga di Teluk Mayalibit sangat dipengaruhi oleh dinamika pendapatan dan memiliki kerentanan terhadap tekanan ekonomi serta faktor lingkungan.

Status dan Tren: Penggunaan Sumberdaya Laut

Frekuensi Melaut

Berdasarkan hasil pemantauan tahun 2025, frekuensi melaut rumah tangga di KKP Teluk Mayalibit umumnya berada pada kategori beberapa kali dalam satu minggu, dengan rata-rata kawasan mencapai 52,08% rumah tangga. Selain itu, proporsi rumah tangga dengan intensitas melaut lebih tinggi, yaitu lebih dari beberapa kali dalam satu minggu, juga cukup besar (32,29%), yang menunjukkan bahwa aktivitas perikanan tangkap masih menjadi kegiatan rutin masyarakat. Kampung dengan intensitas melaut tertinggi pada kategori ini antara lain Warimak (66,67%), Waifoi (63,64%), Yensner (61,90%), Kalikoto (52,94%), dan Beo (42,31%). Sementara itu, kampung seperti Araway, Mumes, Lopintol, dan Warsambin lebih didominasi kategori beberapa kali dalam satu minggu, yang mencerminkan pola melaut reguler namun tidak dilakukan setiap hari. Rumah tangga yang jarang atau hampir tidak pernah melaut relatif kecil, meskipun masih dijumpai di beberapa kampung seperti Go dan Beo. Secara umum, kondisi ini menegaskan bahwa kegiatan melaut masih menjadi bagian penting dalam strategi penghidupan rumah tangga, baik sebagai sumber pendapatan maupun pemenuhan kebutuhan pangan.



Gambar 13. Status dan Tren Frekuensi Melaut

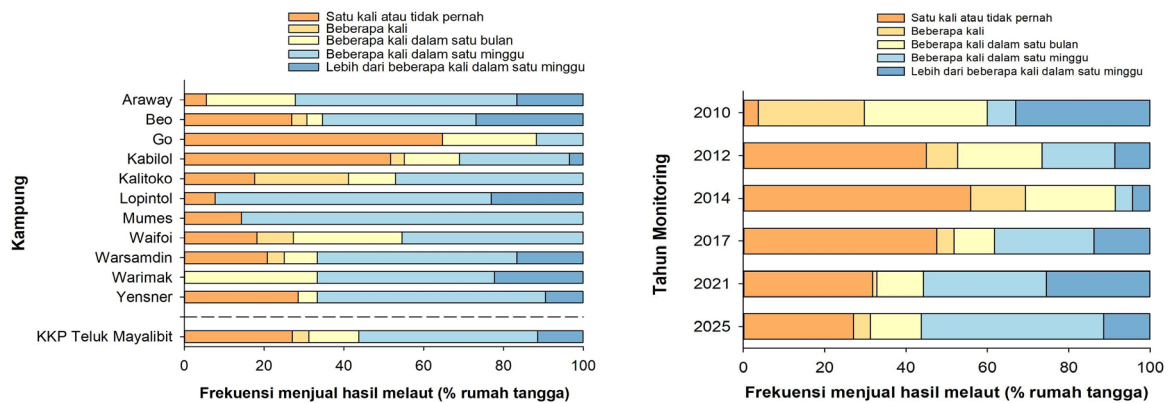
Aktivitas melaut rumah tangga di Teluk Mayalibit sangat dipengaruhi oleh pola musim laut, yang secara umum terbagi menjadi musim teduh pada Oktober–April dan musim ombak/angin kuat pada Mei–September. Pada musim teduh, kondisi laut relatif tenang sehingga rumah tangga lebih sering melaut, dengan frekuensi dapat mencapai 4–7 kali per minggu, serta melakukan perjalanan tangkap lebih jauh ke lokasi penangkapan yang lebih produktif. Periode terbaik untuk melaut umumnya terjadi pada November hingga Februari, ketika cuaca lebih stabil dan peluang memperoleh tangkapan bernilai ekonomi tinggi seperti tenggiri, cakalang, kerapu (goropa), kakap, kepiting, dan lobster lebih besar. Sebaliknya, pada puncak musim ombak terutama Juni–Agustus, sebagian rumah tangga mengurangi intensitas melaut, hanya

menangkap ikan di sekitar teluk atau dekat kampung, bahkan ada yang sementara tidak melaut sama sekali. Dalam kondisi tersebut, strategi rumah tangga biasanya beralih ke kegiatan berkebun, menjual hasil kebun, atau membeli ikan dari kampung lain untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Secara keseluruhan, pola ini menunjukkan bahwa frekuensi melaut masyarakat sangat adaptif terhadap perubahan musim, dengan laut tetap menjadi sumber penghidupan utama namun dilengkapi strategi nafkah alternatif saat cuaca tidak mendukung.

Dalam periode pemantauan tahun 2010–2025, frekuensi melaut rumah tangga menunjukkan dinamika yang cukup jelas. Pada tahun 2010, proporsi rumah tangga yang melaut sangat intensif tercatat 35,27%, kemudian meningkat pada 2021 menjadi 41,62%, sebelum menurun kembali menjadi 32,29% pada 2025. Sebaliknya, kategori beberapa kali dalam satu minggu sempat rendah pada 2014 (15,50%), namun meningkat signifikan hingga 52,08% pada 2025, yang merupakan nilai tertinggi sepanjang periode pemantauan. Proporsi rumah tangga yang hampir tidak pernah melaut juga menurun tajam dari 7,49% (2014) menjadi hanya 0,52% (2025), yang menunjukkan semakin luasnya keterlibatan rumah tangga dalam aktivitas perikanan. Pergeseran ini mengindikasikan bahwa masyarakat cenderung mempertahankan aktivitas melaut secara rutin, dengan penyesuaian terhadap musim, kondisi cuaca, dan alternatif mata pencaharian lainnya. Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan penguatan peran sektor perikanan dalam menopang ekonomi rumah tangga di Teluk Mayalibit.

Frekuensi Menjual Ikan

Berdasarkan hasil pemantauan tahun 2025, frekuensi rumah tangga dalam menjual hasil tangkapan ikan di KK Teluk Mayalibit didominasi oleh kategori beberapa kali dalam satu minggu (44,79%), diikuti oleh lebih dari beberapa kali dalam satu minggu (11,46%). Namun demikian, masih terdapat proporsi yang cukup besar rumah tangga yang jarang atau hampir tidak pernah menjual hasil tangkapan (27,08%), yang menunjukkan bahwa sebagian hasil tangkapan masih dimanfaatkan untuk konsumsi sendiri. Variasi antar kampung cukup mencolok, misalnya Mumes (85,71%) dan Lopintol (69,23%) didominasi penjualan mingguan, sementara Go (64,71%) dan Kabilol (51,72%) cenderung jarang menjual. Aktivitas penjualan umumnya dilakukan melalui penadah lokal atau langsung ke pasar di Waisai, serta dalam beberapa kasus ke Sorong, terutama untuk komoditas bernilai tinggi seperti teripang. Selain itu, terdapat pola khusus di beberapa kampung seperti Warsambin yang menjual teripang ke Waisai dan homestay, serta adanya penadah yang datang langsung ke kampung (misalnya di Waifoi dan Beo untuk komoditas kepiting). Secara umum, kondisi ini menunjukkan bahwa pemasaran hasil laut masih bergantung pada keberadaan penadah dan akses ke pasar regional.



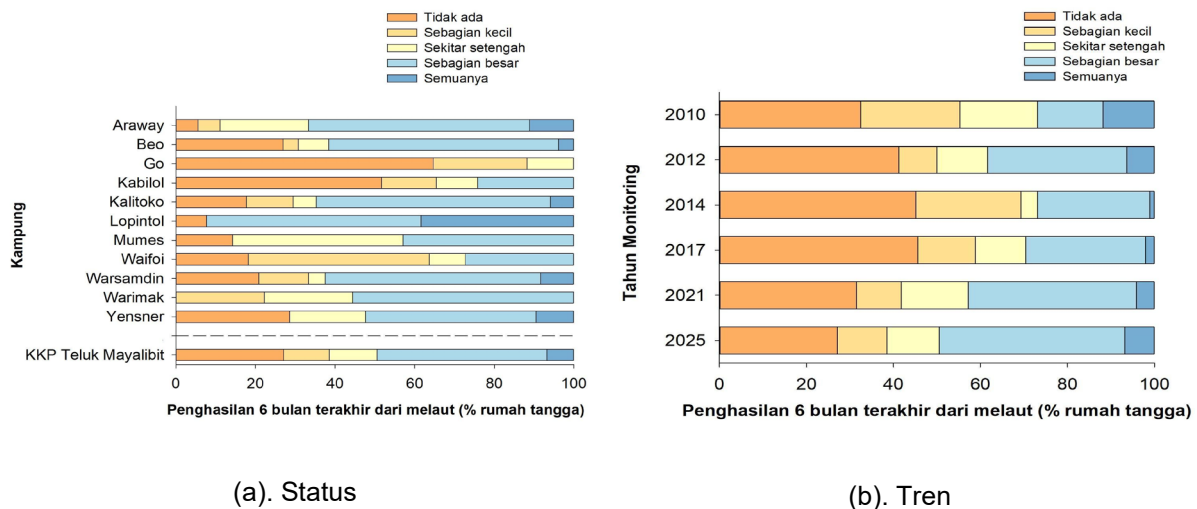
Gambar 14. Status dan Tren Frekuensi Menjual Ikan

Dalam periode 2010–2025, frekuensi penjualan hasil tangkapan menunjukkan pergeseran yang cukup jelas dari kategori jarang menuju lebih rutin. Pada tahun 2014–2017, proporsi rumah tangga yang hampir tidak pernah menjual masih sangat tinggi (55,91% pada 2014 dan 47,52% pada 2017), namun menurun menjadi 27,08% pada 2025. Sebaliknya, kategori penjualan mingguan meningkat signifikan dari 4,30% (2014) menjadi 44,79% (2025), yang menunjukkan peningkatan keterlibatan rumah tangga dalam aktivitas pasar. Peningkatan ini juga diikuti oleh perubahan pola distribusi, di mana penjualan tidak hanya bergantung pada pasar formal tetapi juga melalui jaringan penadah yang datang langsung ke kampung. Meskipun demikian, fluktuasi masih terlihat, terutama pada kategori penjualan intensif yang sempat tinggi pada 2010 (33,06%) dan kembali meningkat pada 2021 sebelum menurun di 2025. Secara keseluruhan, tren ini mengindikasikan peningkatan integrasi ekonomi rumah tangga dengan pasar, meskipun masih dipengaruhi oleh faktor akses, musim, dan keberadaan pembeli lokal.

Penghasilan Penangkapan Ikan

Berdasarkan hasil pemantauan tahun 2025, kontribusi penghasilan rumah tangga dari penangkapan hasil laut di KK Teluk Mayalibit didominasi oleh kategori sebagian besar, dengan rata-rata kawasan mencapai 42,71% rumah tangga. Selain itu, terdapat 27,08% rumah tangga yang menyatakan tidak memperoleh penghasilan dari hasil laut, menunjukkan bahwa sebagian masyarakat lebih bergantung pada sumber pendapatan lain seperti pertanian, pekerjaan upahan, atau usaha kecil. Kampung dengan ketergantungan tertinggi pada hasil laut terlihat di Kalitoko (58,82%), Beo (57,69%), Araway (55,56%), Warimak (55,56%), dan Warsambin (54,17%) pada kategori sebagian besar pendapatan berasal dari melaut. Beberapa kampung juga memiliki rumah tangga yang memperoleh seluruh penghasilan dari hasil laut, terutama Lopintol (38,46%), Araway (11,11%), Yensner (9,52%), dan Warsambin (8,33%). Penghasilan tersebut umumnya berasal dari penjualan ikan pelagis dan demersal seperti tenggiri, cakalang, kerapu, kakap, serta komoditas bernilai tinggi seperti kepiting

bakau, lobster, udang ebi, dan teripang. Secara umum, kondisi ini menunjukkan bahwa sektor perikanan tangkap masih menjadi sumber pendapatan utama bagi banyak rumah tangga, meskipun besarnya kontribusi berbeda antar kampung sesuai akses sumber daya dan peluang pasar.



Gambar 15. Status dan Tren Penghasilan Penangkapan Ikan

Dari sisi tren, ketergantungan rumah tangga terhadap penghasilan dari melaut menunjukkan kecenderungan meningkat sepanjang periode pemantauan. Proporsi rumah tangga yang menyatakan sebagian besar pendapatan berasal dari hasil laut naik dari 15,04% pada 2010 menjadi 42,71% pada 2025, yang merupakan nilai tertinggi selama periode pengamatan. Sebaliknya, rumah tangga yang menyatakan tidak memperoleh penghasilan dari hasil laut sempat tinggi pada 2014 (45,16%) dan 2017 (45,64%), namun menurun menjadi 27,08% pada 2025. Kategori seluruh penghasilan berasal dari hasil laut juga berfluktuasi, dari 11,79% pada 2010, turun pada periode menengah, lalu kembali meningkat menjadi 6,77% pada 2025. Perubahan ini mengindikasikan bahwa perikanan kembali menjadi sumber nafkah penting seiring meningkatnya aktivitas melaut dan permintaan pasar, walaupun masyarakat masih menghadapi kendala harga jual yang rendah akibat dominasi penadah serta menurunnya populasi beberapa komoditas seperti kepiting bakau karena tekanan penangkapan. Secara keseluruhan, tren tersebut menunjukkan penguatan kembali peran sektor perikanan dalam struktur ekonomi rumah tangga masyarakat Teluk Mayalibit.

Akses ke Pasar

Berdasarkan hasil pemantauan tahun 2025, rata-rata waktu tempuh rumah tangga menuju pasar terdekat di KK Teluk Mayalibit berada pada kisaran 1,74 jam. Variasi antar kampung cukup tinggi, di mana kampung dengan akses relatif jauh meliputi Beo (2,95 jam), Araway dan Waifoi (masing-masing sekitar 2,91 jam), serta Kabilol (2,83 jam). Sebaliknya, kampung

dengan akses paling dekat adalah Go (0,20 jam), diikuti Warsambin (0,86 jam) dan Mumes (0,85 jam) yang memiliki akses ke pasar lokal atau kios kampung. Secara umum, pasar yang paling dominan dituju adalah Waisai, selain juga transaksi dilakukan di kios kampung, penadah hasil laut, serta dalam skala lebih kecil ke Sorong atau resort/perusahaan. Moda transportasi yang digunakan cukup beragam, terutama longboat, perahu kayu/fiber, hingga transportasi darat seperti motor atau mobil di kampung tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses pasar masih sangat dipengaruhi oleh letak geografis dan ketersediaan sarana transportasi, sehingga sebagian kampung menghadapi keterbatasan dalam menjangkau pasar utama.

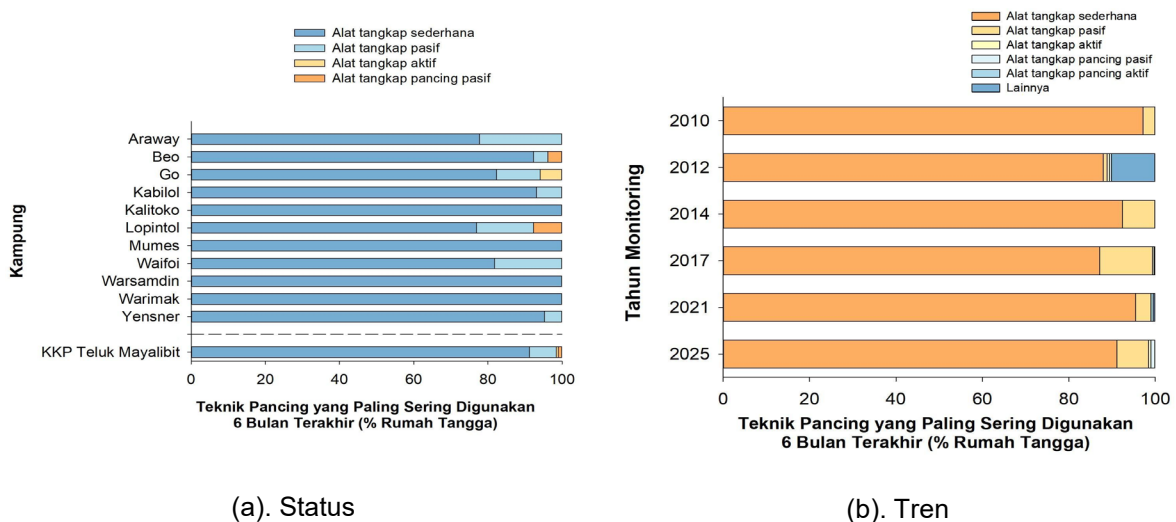


Gambar 16. Status dan Tren Rata-rata Waktu Tempuh ke Pasar

Dalam periode 2012–2025, rata-rata waktu tempuh menuju pasar menunjukkan kecenderungan menurun, dari sekitar 2,47 jam (2012) menjadi 1,74 jam (2025). Penurunan ini berlangsung secara bertahap, dengan nilai 2,32 jam (2014), 2,04 jam (2017), dan 1,77 jam (2021), yang mengindikasikan adanya perbaikan aksesibilitas dari waktu ke waktu. Perbaikan ini kemungkinan didukung oleh peningkatan sarana transportasi laut, bertambahnya konektivitas antar kampung, serta berkembangnya pasar lokal seperti kios dan penadah di tingkat kampung. Meskipun demikian, ketergantungan terhadap Waisai sebagai pusat pasar utama masih tinggi, terutama untuk penjualan hasil laut dan pembelian kebutuhan pokok. Selain itu, akses ke pasar tetap rentan terhadap faktor cuaca dan biaya operasional transportasi, khususnya bagi kampung yang berjarak jauh. Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan perbaikan akses pasar, namun kesenjangan antar kampung masih cukup signifikan dan menjadi faktor penting dalam aktivitas ekonomi rumah tangga.

Teknik Penangkapan Ikan

Hasil monitoring di tingkat kampung menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga masih mengandalkan alat tangkap sederhana sebagai teknik utama dalam enam bulan terakhir, dengan tingkat penggunaan yang mencapai 00% di sebagian besar kampung. Berdasarkan hasil pemantauan tahun 2025, teknik penangkapan ikan yang paling sering digunakan rumah tangga di KK Teluk Mayalibit sangat didominasi oleh alat tangkap sederhana/manual, dengan rata-rata kawasan mencapai 91,15% rumah tangga. Penggunaan alat ini tersebar hampir di seluruh kampung, bahkan mencapai 100% di Kalitoko, Mumes, Warsambin, dan Warimak, serta sangat tinggi di Yensner (95,24%), Kabilol (93,10%), dan Beo (92,31%). Alat tangkap sederhana yang umum digunakan meliputi mata kail, nilon, kalawai, pancing tangan, dan bubu, yang relatif murah, mudah diperoleh, dan sesuai untuk operasi skala kecil di perairan teluk maupun pesisir sekitar kampung. Penggunaan jaring statis/pukat tetap masih terbatas dengan rata-rata 7,29%, tertinggi di Araway (22,22%), Waifoi (18,18%), dan Lopintol (15,38%), sedangkan alat tangkap yang lebih aktif atau bermotor hanya digunakan sangat kecil, misalnya di Go (5,88%). Pada musim tertentu masyarakat juga menggunakan alat khusus untuk menangkap ikan lema, seperti serok dengan bantuan lampu gas dan jala untuk menggiring ikan ke perairan dangkal. Secara umum, kondisi ini menunjukkan bahwa perikanan rumah tangga di Teluk Mayalibit masih didominasi usaha tangkap tradisional berskala kecil dengan ketergantungan tinggi pada teknologi sederhana.



Gambar 17. Status dan Tren Teknik Pancing yang Digunakan Rumah Tangga

Dalam periode pemantauan tahun 2010–2025, penggunaan alat tangkap sederhana tetap menjadi metode dominan meskipun mengalami fluktuasi. Proporsinya tercatat sangat tinggi pada 2010 (97,17%), menurun pada 2017 (87,11%), lalu kembali meningkat menjadi 91,15% pada 2025. Sementara itu, penggunaan jaring statis meningkat dari 2,83% pada 2010 menjadi 12,26% pada 2017, kemudian menurun menjadi 7,29% pada 2025. Alat tangkap yang lebih mobile seperti jaring bergerak atau pancing aktif tetap sangat rendah sepanjang periode

pengamatan dan tidak berkembang secara signifikan. Pola ini menunjukkan bahwa modernisasi teknologi penangkapan berlangsung lambat, kemungkinan dipengaruhi keterbatasan modal, biaya operasional, dan kondisi perairan teluk yang masih mendukung metode tradisional. Secara keseluruhan, tren tersebut menegaskan bahwa sistem perikanan lokal tetap bertumpu pada alat tangkap sederhana, sementara penggunaan alat yang berpotensi lebih intensif seperti jaring besar atau *troll line* masih terbatas dan perlu diawasi agar tidak meningkatkan tekanan sumber daya.



Foto: Kezia E. Salosso



Foto: SAC LPPM UNIRA



Foto: Kezia E. Salosso



Foto: Kezia E. Salosso



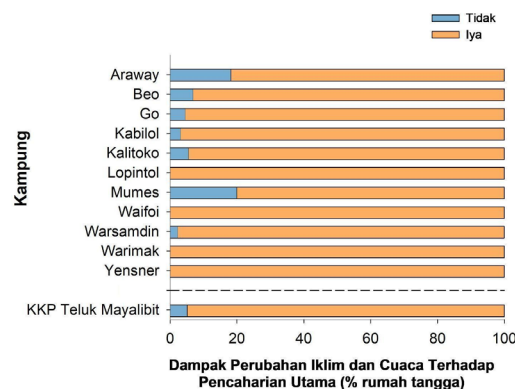
Foto: Arnoldus S. Ananta

“KKP Teluk Mayalibit memiliki potensi sumber daya perikanan yang melimpah, termasuk ikan, udang ebi, kepiting bakau, dan teripang yang bernilai ekonomis penting. Pemanfaatan hasil laut oleh masyarakat masih dilakukan melalui praktik penangkapan tradisional.”

Status: Iklim dan Cuaca

Iklim dan Cuaca

Pemantauan persepsi rumah tangga terhadap perubahan iklim dan cuaca dilakukan sebagai bagian dari survei dasar (*baseline survey*) di KKP Teluk Mayalibit. Berdasarkan hasil tahun 2025, hampir seluruh rumah tangga (94,94%) menyatakan mengamati adanya perubahan iklim dan cuaca dalam beberapa tahun terakhir. Proporsi ini bahkan mencapai 100% di beberapa kampung seperti Lopintol, Waifoi, Warimak, dan Yensner, serta tetap sangat tinggi di kampung lain seperti Warsambin (97,73%), Kabilol (96,88%), dan Go (95,45%). Dari rumah tangga yang mengamati perubahan tersebut, sekitar 83,93% menyatakan bahwa kondisi ini berdampak langsung pada mata pencaharian utama mereka. Temuan ini menunjukkan bahwa perubahan iklim dan cuaca telah dirasakan secara luas oleh masyarakat dan menjadi faktor penting dalam sistem penghidupan di Teluk Mayalibit.



Gambar 18. Dampak Perubahan Iklim dan Cuaca Terhadap Pencaharian Utama

Perubahan iklim dan cuaca umumnya berdampak negatif terhadap aktivitas ekonomi rumah tangga, terutama melalui gangguan pada kegiatan melaut, berkebun, dan usaha lainnya. Gelombang tinggi dan angin kencang pada musim tertentu membatasi aktivitas melaut serta meningkatkan risiko dan biaya operasional, sementara curah hujan yang tinggi menghambat kegiatan kebun, pengambilan hasil hutan, dan proses pengolahan seperti pengeringan udang ebi. Selain itu, ketidakpastian musim menyebabkan perubahan pola tangkapan ikan dan menurunkan produktivitas, serta memicu dampak lingkungan seperti abrasi pantai dan kejadian ikan mati mendadak di beberapa lokasi. Meskipun demikian, sebagian kecil responden menyebut adanya dampak positif, seperti cuaca panas yang mendukung proses pengeringan hasil dan pada kondisi tertentu meningkatkan hasil tangkapan atau pertumbuhan tanaman. Terdapat pula rumah tangga yang menilai dampaknya relatif netral karena mereka dapat menyesuaikan jenis pekerjaan sesuai kondisi cuaca. Secara keseluruhan, perubahan ini menunjukkan adanya tekanan yang cukup besar terhadap stabilitas mata pencaharian, meskipun dengan tingkat dampak yang bervariasi antar rumah tangga.

Dalam menghadapi perubahan tersebut, rumah tangga umumnya menerapkan strategi adaptasi secara fleksibel, seperti beralih dari melaut ke berkebun saat cuaca buruk, memanfaatkan cuaca panas untuk pengolahan hasil, serta tetap melakukan aktivitas ekonomi meskipun dalam kondisi terbatas. Strategi ini mencerminkan adanya kapasitas adaptasi lokal yang cukup baik, namun masih bersifat reaktif dan jangka pendek. Untuk meningkatkan ketahanan jangka panjang, diperlukan upaya mitigasi dan adaptasi yang lebih terencana, seperti peningkatan akses terhadap informasi cuaca, penguatan diversifikasi mata pencaharian, serta pengembangan teknik pengolahan hasil yang tidak bergantung pada kondisi cuaca. Selain itu, penguatan kelembagaan lokal dan dukungan infrastruktur yang ramah iklim juga menjadi penting untuk mengurangi risiko dan meningkatkan stabilitas penghidupan masyarakat pesisir.

“Perubahan iklim dan cuaca yang semakin tidak menentu mulai memengaruhi kehidupan masyarakat pesisir di KKP Teluk Mayalibit. Di tengah tantangan tersebut, mangrove menjadi benteng alami yang melindungi kampung dari hempasan ombak sekaligus menopang kehidupan masyarakat melalui sumber daya laut yang tersedia di sekitarnya.”

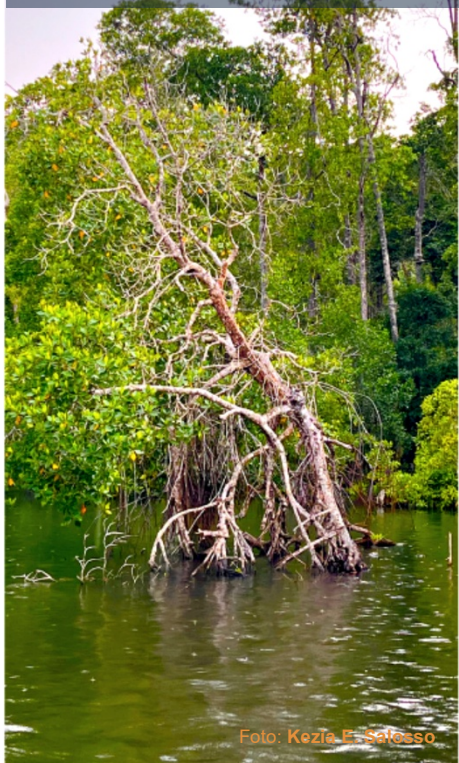


Foto: Kezia E. Salosso



Foto: Kezia E. Salosso



Foto: Arnoldus S. Ananta

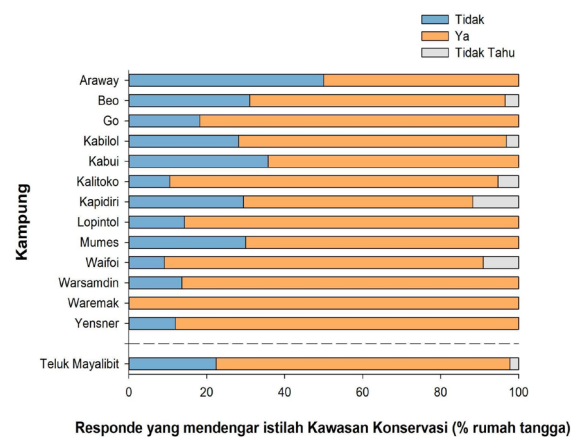


Foto: Jeniffer A. Maleke

Status: Kesadaran akan Peraturan Pelestarian Laut

Pemahaman masyarakat terhadap kawasan konservasi merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung efektivitas pengelolaan kawasan serta keberlanjutan sumber daya laut. Tingkat pengetahuan dan persepsi masyarakat dapat mempengaruhi bagaimana aturan pengelolaan dipahami, diterima, dan dijalankan dalam praktik sehari-hari. Oleh karena itu, pemantauan sosial ekonomi juga mengkaji beberapa aspek terkait pemahaman masyarakat terhadap kawasan konservasi, termasuk pengenalan istilah kawasan konservasi, pengetahuan mengenai peraturan penangkapan ikan, serta persepsi masyarakat tentang pengertian dan aturan penangkapan ikan di dalam kawasan konservasi. Selain itu, survei ini juga mengevaluasi persepsi masyarakat mengenai letak kampung mereka dalam kawasan konservasi. Informasi ini penting untuk melihat sejauh mana masyarakat memahami keberadaan dan fungsi kawasan konservasi di wilayah mereka, serta untuk mengidentifikasi kebutuhan sosialisasi atau peningkatan pemahaman masyarakat di masa mendatang.

Pengenalan Istilah Kawasan Konservasi

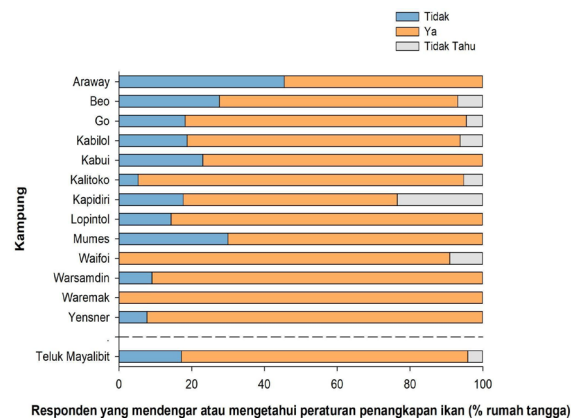


Gambar 19. Status Responden yang Mendengar Istilah Kawasan Konservasi

Berdasarkan hasil pemantauan tahun 2025, sebagian besar responden di KKP Teluk Mayalibit telah mendengar istilah kawasan konservasi, dengan proporsi mencapai sekitar 75,37% pada tingkat kawasan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengetahuan dasar masyarakat terhadap konsep kawasan konservasi secara umum sudah cukup baik. Tingkat pengenalan tergolong tinggi di hampir seluruh kampung, bahkan mencapai 100% di Waremak, serta tinggi di Yensner (88%), Warsambin (86,36%), Lopintol (85,71%), Kalitoko (84,21%), dan Go serta Waifoi (masing-masing 81,82%). Namun demikian, masih terdapat variasi antar kampung, dengan nilai yang relatif lebih rendah di Mumes (70%), Kabilol (68,75%), Beo (65,51%), Kabui (64,28%), Kapidiri (58,82%), dan Araway (50%). Selain itu, proporsi responden yang menjawab “tidak tahu” relatif kecil (sekitar 2,24%), yang menunjukkan sebagian besar responden memiliki kepastian dalam menjawab. Perbedaan antar kampung ini

mengindikasikan bahwa penyebaran informasi dan pemahaman masyarakat belum merata di seluruh wilayah. Variasi tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh perbedaan akses terhadap informasi, intensitas sosialisasi, serta keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan kawasan konservasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan upaya sosialisasi dan edukasi, khususnya pada kampung dengan tingkat pengenalan yang masih rendah, agar pemahaman masyarakat dapat lebih merata.

Mendengar atau Mengetahui Peraturan Penangkapan Ikan

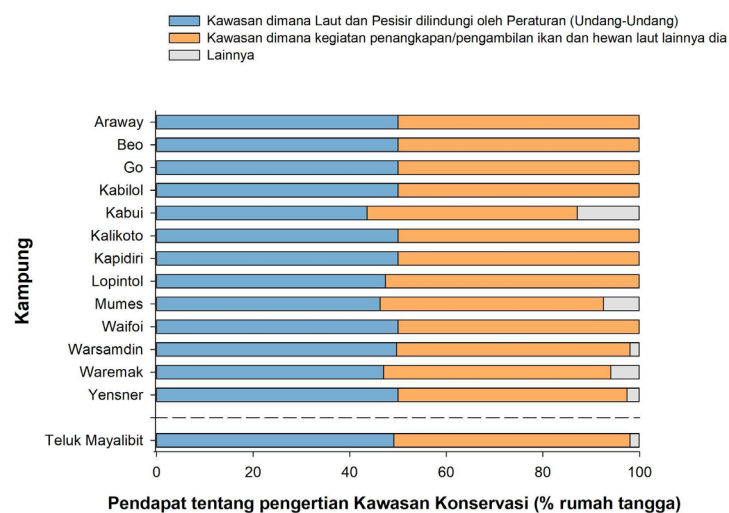


Gambar 20. Status Responden yang Mendengar atau Mengetahui Peraturan Penangkapan Ikan

Hasil pemantauan tahun 2025 di KKP Teluk Mayalibit menunjukkan bahwa sekitar 78,73% responden menyatakan telah mendengar atau mengetahui peraturan penangkapan ikan, sementara 17,16% belum mengetahui dan 4,10% menjawab tidak tahu. Secara umum, kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan dasar masyarakat terhadap peraturan penangkapan ikan di kawasan konservasi tergolong cukup baik. Tingkat pengetahuan tertinggi tercatat di Kampung Waremak (100%), diikuti Yensner (92,30%), Warsambin dan Waifo ($\pm 90\%$), serta Kalitoko (89,47%) dan Lopintol (85,71%). Kampung lain seperti Go (77,27%), Kabui (76,92%), Kabilol (75%), dan Mumes (70%) menunjukkan tingkat pengetahuan yang cukup, meskipun belum setinggi kampung lainnya. Sementara itu, Kampung Beo (65,51%), Kapidiri (58,82%), dan Araway (54,55%) memiliki tingkat pengetahuan yang relatif lebih rendah. Variasi ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap peraturan penangkapan ikan masih belum merata antar kampung. Perbedaan tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh akses informasi, intensitas sosialisasi, serta keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sosialisasi dan edukasi, khususnya di kampung dengan tingkat pengetahuan yang masih rendah, agar pemahaman masyarakat terhadap aturan penangkapan ikan dapat lebih merata.

Pendapat tentang Pengertian Kawasan Konservasi

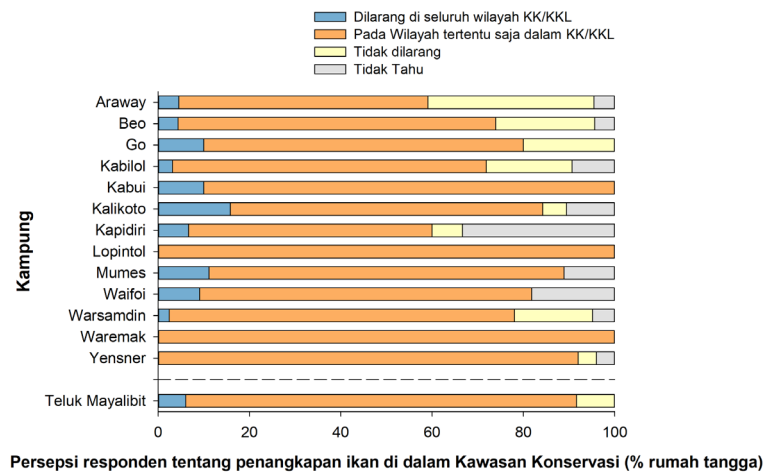
Secara keseluruhan, masyarakat di KKP Teluk Mayalibit mendefinisikan kawasan konservasi dalam dua pemahaman utama yang relatif seimbang, yaitu sebagai kawasan dimana laut dan pesisir dilindungi oleh peraturan (49,10%) dan sebagai kawasan dimana kegiatan penangkapan ikan serta pemanfaatan sumber daya laut diatur oleh peraturan (48,87%). Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum tingkat pemahaman dasar masyarakat terhadap konsep kawasan konservasi sudah cukup baik. Di beberapa kampung seperti Yensner, Waifoi, Kapidiri, Kalitoko, Kabilol, Go, Beo, dan Araway, proporsi kedua definisi tersebut sama besar (masing-masing 50%), yang mengindikasikan pemahaman yang relatif seimbang antara fungsi perlindungan dan pengaturan pemanfaatan. Namun demikian, masih terdapat variasi antar kampung yang menunjukkan perbedaan penekanan dalam memahami konsep kawasan konservasi.



Gambar 21. Status Pendapat Responden tentang Pengertian Kawasan Konservasi

Pada tingkat kampung, variasi pemahaman terlihat cukup jelas. Masyarakat di Kampung Warsambin (49,65%) cenderung lebih menekankan fungsi perlindungan laut dan pesisir, sedangkan di Kampung Lopintol (52,63%) lebih mengaitkan kawasan konservasi dengan pengaturan pemanfaatan sumber daya laut. Sementara itu, kategori jawaban “lainnya” yang relatif lebih tinggi di Kampung Kabui (12,90%) menunjukkan adanya interpretasi tambahan, seperti kawasan konservasi dipahami sebagai wilayah sasi atau wilayah laut yang dijaga dan dilindungi secara adat. Hal ini mencerminkan kuatnya pengaruh kearifan lokal dalam memahami konsep konservasi di tingkat masyarakat. Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa meskipun pengetahuan dasar sudah cukup baik, pemahaman yang lebih komprehensif dan seragam masih perlu diperkuat melalui sosialisasi yang mengintegrasikan konsep konservasi formal dengan praktik adat yang telah dikenal masyarakat.

Pendapat tentang Penangkapan Ikan di KKP



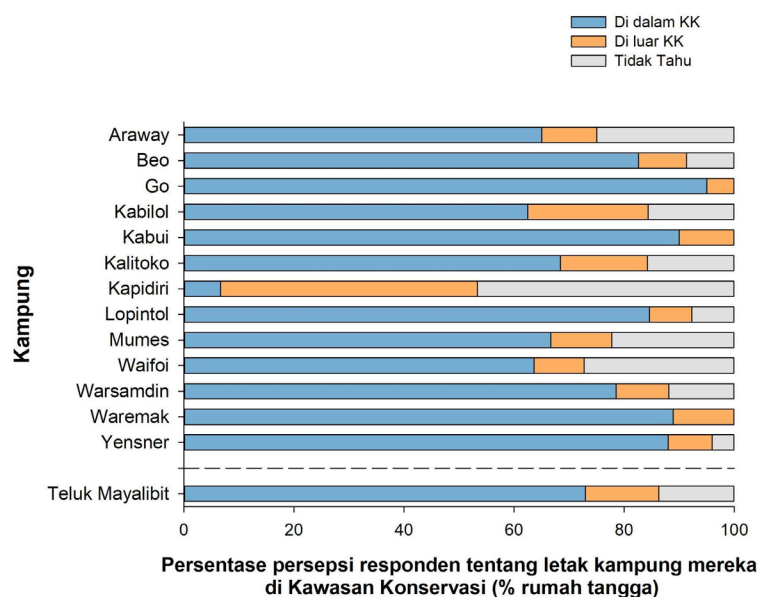
Gambar 22. Status Persepsi Responden tentang Penangkapan Ikan di dalam Kawasan Konservasi

Hasil pemantauan tahun 2025 menunjukkan bahwa pada tingkat kawasan, sebagian besar masyarakat (85,58%) berpendapat bahwa penangkapan ikan di Kawasan Konservasi hanya diperbolehkan pada wilayah tertentu (zonasi), sementara sebagian kecil berpendapat bahwa penangkapan ikan dilarang di seluruh wilayah (6,05%) dan sebagian lainnya menilai tidak dilarang (15,35%). Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum pemahaman masyarakat terhadap konsep pengaturan zonasi dalam kawasan konservasi sudah cukup baik. Tingkat pemahaman yang sangat tinggi terlihat di Kampung Waremak dan Lopintol (100%), diikuti Yensner (92%) dan Kabui (90%), yang mengindikasikan pemahaman yang kuat terhadap aturan pembagian ruang pemanfaatan. Namun demikian, masih terdapat variasi persepsi antar kampung. Kampung Kalitoko (15,79%) dan Mumes (11,11%) menunjukkan proporsi relatif lebih tinggi pada jawaban bahwa penangkapan ikan dilarang di seluruh kawasan, yang mengindikasikan adanya pemahaman yang belum sepenuhnya tepat terhadap konsep zonasi. Di sisi lain, Kampung Araway (36,36%) dan Beo (21,74%) memiliki proporsi cukup tinggi pada jawaban bahwa penangkapan ikan tidak dilarang, yang menunjukkan masih adanya persepsi bahwa aktivitas penangkapan dapat dilakukan tanpa pembatasan. Selain itu, Kampung Kapidiri memiliki proporsi “tidak tahu” tertinggi (33,33%), yang menandakan masih terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi yang berlaku. Perbedaan persepsi ini kemungkinan dipengaruhi oleh kuatnya sistem adat seperti sasi, di mana pengaturan pemanfaatan sumber daya laut lebih dikenal berdasarkan wilayah adat, sehingga belum sepenuhnya selaras dengan konsep zonasi formal dalam kawasan konservasi.

Letak Kampung di KKP

Berdasarkan hasil pemantauan tahun 2025, sebagian besar responden di wilayah KKP Teluk Mayalibit memahami bahwa kampung mereka berada di dalam kawasan konservasi, dengan proporsi mencapai sekitar 72,98% rumah tangga pada tingkat kawasan. Sementara itu,

sebagian kecil responden menyatakan bahwa kampung mereka berada di luar kawasan konservasi (13,31%) dan 13,71% lainnya menyatakan tidak mengetahui. Pada tingkat kampung, pemahaman ini terlihat kuat di beberapa lokasi, seperti Kampung Go (95%), Kabui (90%), dan Warimak (88,89%), di mana mayoritas responden menyadari bahwa kampung mereka termasuk dalam kawasan konservasi. Sebaliknya, Kampung Kapidiri menunjukkan proporsi tertinggi responden yang menyatakan berada di luar kawasan (46,67%), sementara tingkat ketidaktahuan relatif tinggi ditemukan di Kampung Waifoi (27,27%), Araway (25%), dan Mumes (22,22%). Kondisi ini mengindikasikan bahwa pemahaman masyarakat mengenai batas dan keberadaan kawasan konservasi masih belum merata di seluruh kampung. Perbedaan tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh variasi akses informasi, tingkat keterlibatan dalam kegiatan pengelolaan kawasan, serta intensitas sosialisasi yang diterima oleh masyarakat.



Gambar 23. Status Persepsi Responden tentang Letak Kampung Mereka di Kawasan Konservasi

Secara umum, tingginya tingkat pengetahuan masyarakat di sebagian besar kampung menunjukkan bahwa upaya sosialisasi yang dilakukan oleh pengelola kawasan, seperti BLUD UPTD Raja Ampat, bersama lembaga swadaya masyarakat, telah memberikan dampak positif. Kegiatan penyuluhan dan pendampingan yang dilakukan secara berkala berperan penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan batas kawasan konservasi. Namun demikian, masih adanya kampung dengan tingkat pemahaman yang rendah menunjukkan perlunya penguatan strategi komunikasi yang lebih merata dan kontekstual. Pendekatan berbasis kampung, termasuk pemanfaatan kelembagaan lokal dan tokoh masyarakat, dapat menjadi kunci untuk meningkatkan pemahaman yang lebih menyeluruh. Dengan demikian, peningkatan pemahaman spasial masyarakat terhadap kawasan konservasi diharapkan dapat mendukung efektivitas pengelolaan kawasan serta kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

BAGIAN III

REKOMENDASI KEBIJAKAN



Rekomendasi kebijakan ini disusun berdasarkan hasil pemantauan sosial ekonomi masyarakat di Kawasan Konservasi Perairan Teluk Mayalibit selama periode 2010 sampai 2025. Tujuannya adalah memberikan arah kebijakan yang selaras dengan prinsip konservasi berkelanjutan sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir di wilayah Bentang Laut Kepala Burung Papua.

1. Karakteristik Demografi

Struktur penduduk di KKP Teluk Mayalibit yang masih didominasi kelompok usia muda menunjukkan potensi tenaga kerja yang besar di masa depan, namun juga menuntut peningkatan investasi pada sektor pendidikan dan kesehatan. Distribusi penduduk antar kampung yang bervariasi perlu direspons dengan kebijakan pembangunan yang lebih merata, terutama dalam penyediaan layanan pendidikan menengah dan akses transportasi bagi pelajar. Selain itu, peningkatan partisipasi sekolah yang masih fluktuatif mengindikasikan perlunya dukungan berkelanjutan, termasuk subsidi transportasi dan penguatan fasilitas pendidikan di tingkat lokal. Penguatan data kependudukan dan pendidikan juga menjadi penting sebagai dasar perencanaan pembangunan yang terintegrasi dengan pengelolaan kawasan konservasi.

2. Indikator Sosial

Penurunan ketahanan pangan rumah tangga pada tahun 2025 menunjukkan perlunya penguatan sistem pangan berbasis lokal, termasuk pengembangan kebun pangan, diversifikasi sumber pangan, serta peningkatan akses distribusi bahan pokok. Meskipun ketahanan pangan anak relatif baik, masih terdapat kelompok rumah tangga rentan yang memerlukan intervensi khusus. Layanan kesehatan dasar perlu terus diperkuat, terutama dalam meningkatkan akses layanan dan sistem rujukan antar kampung. Selain itu, keberadaan hak kelautan berbasis adat yang masih kuat perlu diintegrasikan secara lebih formal dalam sistem pengelolaan kawasan untuk menjamin keadilan akses dan keberlanjutan sumber daya. Tingginya keterikatan masyarakat terhadap laut merupakan modal sosial yang strategis dan perlu dimanfaatkan dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi.

3. Karakteristik Ekonomi

Struktur ekonomi rumah tangga di Teluk Mayalibit masih didominasi oleh sektor perikanan tangkap, namun mulai menunjukkan adanya diversifikasi ke sektor pertanian, pekerjaan upahan, dan usaha lokal. Kondisi ini perlu diperkuat melalui kebijakan yang mendorong diversifikasi mata pencaharian, termasuk pengembangan usaha berbasis pariwisata, pengolahan hasil perikanan, dan ekonomi lokal lainnya. Fluktuasi kepemilikan aset rumah tangga menunjukkan adanya kerentanan ekonomi yang dipengaruhi oleh faktor cuaca, akses pasar, dan pendapatan. Oleh karena itu, diperlukan intervensi berupa peningkatan

akses terhadap sarana produksi, dukungan modal usaha, serta penguatan kapasitas ekonomi masyarakat. Arah kebijakan ekonomi di Teluk Mayalibit perlu menitikberatkan pada pembangunan ekonomi yang inklusif, adaptif terhadap perubahan lingkungan, dan selaras dengan prinsip keberlanjutan kawasan konservasi.

4. Penggunaan Sumber Daya Laut

Aktivitas melaut masih menjadi sumber penghidupan utama masyarakat dengan intensitas yang tinggi dan kontribusi besar terhadap pendapatan rumah tangga. Namun, keterbatasan akses pasar dan dominasi penadah menyebabkan posisi tawar nelayan masih relatif lemah. Oleh karena itu, kebijakan perlu diarahkan pada peningkatan akses pasar melalui penguatan transportasi laut, pengembangan pasar lokal, serta pembentukan atau penguatan kelembagaan ekonomi seperti koperasi nelayan. Dominasi penggunaan alat tangkap sederhana yang relatif ramah lingkungan perlu dipertahankan melalui peningkatan kapasitas nelayan serta pengawasan terhadap penggunaan alat tangkap yang berpotensi merusak. Selain itu, penguatan rantai nilai hasil perikanan menjadi penting untuk meningkatkan pendapatan tanpa meningkatkan tekanan terhadap sumber daya laut.

5. Adaptasi Perubahan Iklim dan Cuaca

Tingginya persepsi masyarakat terhadap perubahan iklim dan cuaca serta dampaknya terhadap mata pencaharian menunjukkan perlunya strategi adaptasi yang lebih terencana. Prioritas kebijakan meliputi penyediaan informasi cuaca yang akurat dan mudah diakses oleh nelayan, penguatan infrastruktur pesisir, serta pengembangan teknik pengolahan hasil yang tidak bergantung pada kondisi cuaca. Selain itu, diversifikasi sumber penghidupan menjadi penting terutama pada musim gelombang tinggi yang membatasi aktivitas melaut. Pendekatan adaptasi berbasis komunitas perlu diperkuat untuk meningkatkan ketahanan sosial ekonomi masyarakat terhadap risiko iklim dan cuaca yang semakin tidak menentu.

6. Penguatan Tata Kelola Kawasan Konservasi

Meskipun tingkat pengetahuan masyarakat terhadap kawasan konservasi dan peraturan penangkapan ikan tergolong cukup baik, pemahaman antar kampung masih belum merata. Oleh karena itu, sosialisasi mengenai zonasi, aturan pemanfaatan, dan tujuan konservasi perlu dilakukan secara lebih intensif dan berkelanjutan dengan pendekatan yang sesuai konteks lokal dan budaya masyarakat. Integrasi antara sistem adat seperti hak ulayat laut dengan kebijakan formal perlu diperkuat untuk menciptakan tata kelola yang lebih adil dan efektif. Keterlibatan pemerintah kampung, tokoh adat, kelompok perempuan, pemuda, dan nelayan juga perlu ditingkatkan agar pengelolaan kawasan menjadi lebih partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan.



DAFTAR PUSTAKA

- Allen, G. R., & Erdmann, M. V. (2009). *Reef fishes of the Bird's Head Peninsula, Papua, Indonesia*. Check List, 5(3), 587–628. <https://doi.org/10.15560/5.3.587>
- Allen, G. R., & Erdmann, M. V. (2012). *Reef fishes of the East Indies* (Vols. 1–3). Perth, Australia: University of Hawai'i Press.
- Allen, G. R., Erdmann, M. V., & Munday, P. L. (2003). *Reef fishes of the Bird's Head Peninsula, West Papua, Indonesia*. *Aquarium Sciences and Conservation*, 5(1), 1–28. <https://doi.org/10.1023/A:1025337819823>
- Bickel, G., Nord, M., Price, C., Hamilton, W., & Cook, J. (2000). *Guide to Measuring Household Food Security, Revised 2000*. Alexandria, VA: U.S. Department of Agriculture, Food and Nutrition Service. (<https://www.fns.usda.gov/guide-measuring-household-food-security-revised-2000>)
- BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat (Website: <https://kkprajaampat.com/teluk-mayalibit/>; April 2026).
- Casey, P. H., Szeto, K. L., Robbins, J. M., Stuff, J. E., Connell, C., Gossett, J. M., & Simpson, P. M. (2005). Child health-related quality of life and household food security. *Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine*, 159(1), 51–56. <https://doi.org/10.1001/archpedi.159.1.51>
- Cinner, J. E. (2005). Socioeconomic factors influencing customary marine tenure in the Indo-Pacific. *Ecology and Society*, 10(1), 36. <https://doi.org/10.5751/ES-01230-100136>
- Conservation International. (2021). *Bird's Head Seascape: A Global Priority for Marine Conservation*. Retrieved from <https://www.conservation.org/>
- Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. (2017). *Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Kawasan Konservasi Kaimana Tahun 2018–2027*. Jakarta: KLHK.
- Erdmann, M. V., & Allen, G. R. (2009). *A rapid marine biodiversity assessment of the Bird's Head Seascape, West Papua, Indonesia*. RAP Bulletin of Biological Assessment No. 20. Arlington, VA: Conservation International.
- Glew, L., M.B. Mascia and F. Pakiding. (2012). Solving the Mystery of MPA Performance: monitoring social impacts. Field Manual (version 1.0). World Wildlife Fund and Universitas Negeri Papua, Washington D.C. and Manokwari, Indonesia.
- Lewis, M. Paul, Gary F. Simons, and Charles D. Fennig (eds.). 2015. *Ethnologue: Languages of the World*, Eighteenth edition. Dallas, Texas: SIL International. Online: <http://www.ethnologue.com>.
- Martorell, R. (1995). Results and implications of the INCAP follow-up study. *Journal of Nutrition*, 125(4 Suppl), 1127S–1138S. https://doi.org/10.1093/jn/125.suppl_4.1127S
- United Nations Development Programme (UNDP), Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), World Bank, & Commission of the European Communities. (1990). *Guidelines for Programme Design, Monitoring and Evaluation*. OECD/DAC Expert Group on Aid Evaluation.
- Williams, D. R., & Vaske, J. J. (2003). The measurement of place attachment: Validity and generalizability of a psychometric approach. *Forest Science*, 49(6), 830–840.

